BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **"Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023"** dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan Jabodetabek yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, Mei 2023

PLT.KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

Dr. ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19790629 199802 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1. LATAR BELAKANG 1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
3. STRUKTUR ORGANISASI 3
4. PERJANJIAN KINERJA 7
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA **9**
A. CAPAIAN KINERJA 9
1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek 10
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek 14
3. *On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek 16
4. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan 17
5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 18
B. REALISASI ANGGARAN 20
1. Alokasi Anggaran Tahun 2022 20
2. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023 20
3. Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2023 21
BAB III PENUTUP **23**
LAMPIRAN **24**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 6

Gambar 2.1. Kurva Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan BPTJ Triwulan I Tahun 2023 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2022 8

Tabel 2.1. Capaian Kinerja BPTJ Triwulan I Tahun 2023 9
Tabel 2.2. Panjang Jaringan Jalan di Wilayah Jabodetabek 11
Tabel 2.3. Panjang Jaringan Rel di Wilayah Jabodetabek 12
Tabel 2.4. Data Integrasi Simpul Transportasi di Jabodetabek 13
Tabel 2.5. Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat 14
Tabel 2.6. Penilaian Unsur Pelayanan 15
Tabel 2.7. On Time Performance Bus Perkotaan 16
Tabel 2.8. On Time Performance Kereta Api Perkotaan 16
Tabel 2.13. Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023 20
Tabel 2.14. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan I Tahun 2023 21

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja BPTJ selama Triwulan I Tahun 2023, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2023. Komitmen dimaksud merupakan fokus BPTJ dalam mencapai target kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran BPTJ yang telah ditetapkan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Untuk melaporkan capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja *(performance result)* tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan rencana kerja *(performance plan)* yang telah disesuaikan dengan DIPA TA 2023, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BPTJ. Analisis atas capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, meliputi:

2.1. Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

2.2. Fungsi

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

d. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;

i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

j. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);

k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

l. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan

m. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, terdiri dari Sekretariat Badan, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan.

3.1. Sekretariat Badan

a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan
- Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

3.2. Direktorat Prasarana

a. Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.3. Direktorat Lalu Lintas

a. Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3.4. Direktorat Angkutan

a. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

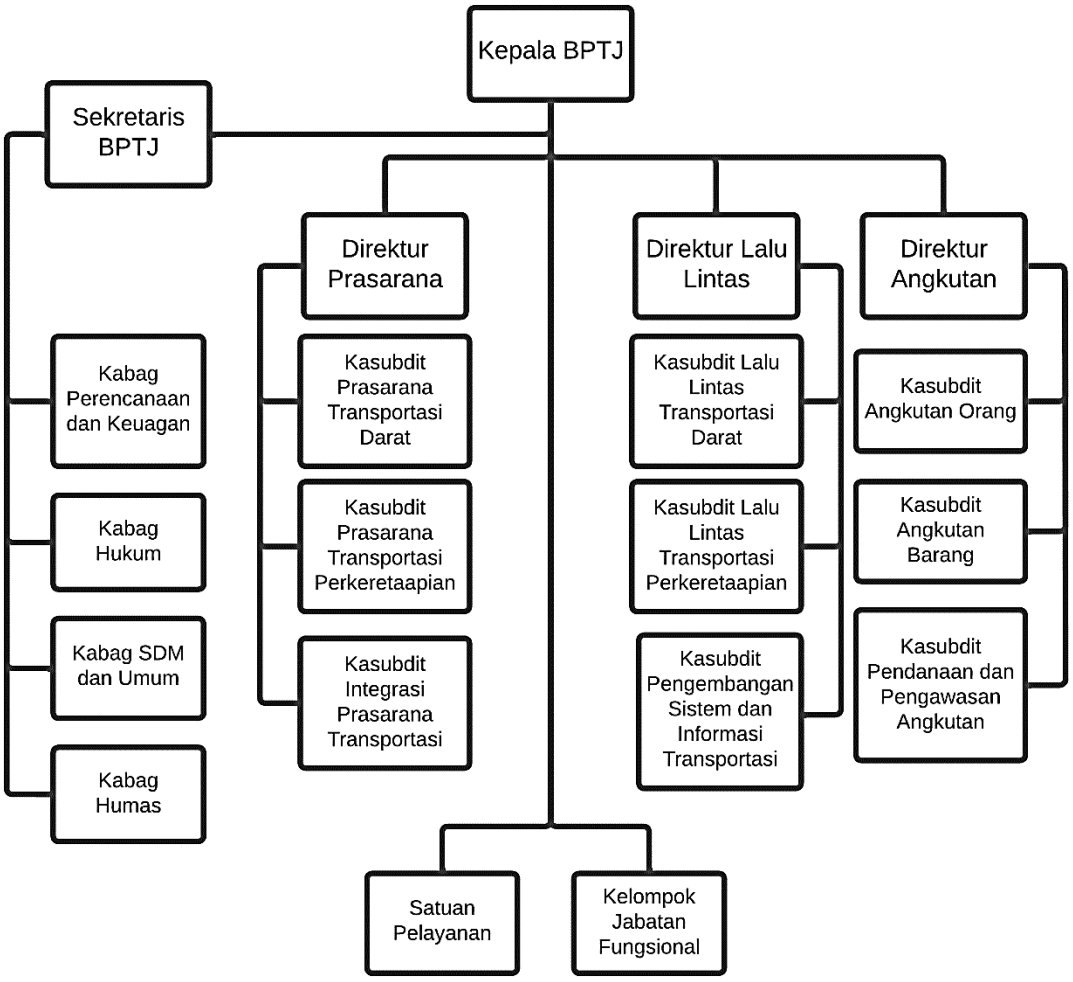

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

4. PERJANJIAN KINERJA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun 2023 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon II dengan Eselon I, serta ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dengan Menteri Perhubungan.

Sasaran Program (SP) BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan Sasaran Program dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Sasaran Program BPTJ terdiri dari 4 (empat) sasaran program:

1. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek;
2. Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek;
3. Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek;
4. Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Selanjutnya empat Sasaran Program tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP). Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah sebagai berikut:

1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
3. OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek;
4. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan;
5. Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ.

Adapun penjabaran dari perspektif sasaran BPTJ dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

a. Sasaran Program Pertama (SP1) yang akan dicapai adalah terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP1) yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek.

b. Sasaran Program Kedua (SP2) yang akan dicapai adalah terwujudnya kinerja layanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

   - IKP 2.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

transportasi perkotaan Jabodetabek.

- IKP 2.2: *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi perkotaan Jabodetabek.

c. Sasaran Program Ketiga (SP3) yang akan dicapai adalah terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP3) yaitu Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan.

d. Sasaran Program Keempat (SP5) yang akan dicapai adalah terwujudnya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP5) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Korelasi antara Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program serta satuan dan target diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2023

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
SS1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	**SP1** Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	**IKP1** Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Rasio	0,421
SS2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	**SP2** Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKP2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Nilai	93
		IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	85
SS3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	**SP3** Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	**IKP3** Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	%	99
SS4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	**SP5** Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**IKP5** Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	Nilai	32,1

Sumber: Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2023

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran program BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2023 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ, berikut adalah pencapaian Sasaran Program (SP) BPTJ pada Triwulan I Tahun 2023:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja BPTJ Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK 2022	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	**IKP1** Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Nilai	0,421	0,384	0,3836	91,12%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKP2.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Nilai	93	92,23	92,31	100,08%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	85	81	88,66	109,46%
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	**IKP3** Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam	%	99	92,41	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK 2022	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian
	10.000 Keberangkatan					
SP5 Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**IKP5** Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	Nilai	32,1	31,88	-	-

1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Analisis Capaian Kinerja

Konektivtas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan tiga unsur pembentuk yaitu konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan, konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel, dan persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi. Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diukur melalui IKP ini dengan rumus berikut:

$$IKP1 = (30\% \times \frac{IKK1}{100}) + (30\% \times IKK2) + (40\% \times \frac{IKK3}{100})$$

a) IKK1 Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Konektivitas angkutan umum berbasis jalan mencerminkan cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan di jalan raya yang mengintegrasikan satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan adanya layanan angkutan umum yang menghubungkan antar tempat, masyarakat dapat berangkat menuju tempat tujuan dengan menggunakan angkutan umum sebagai pilihan utama bermobilitas. Konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan diukur menggunakan rumus:

$$IKK1 = \frac{Panjang\ Trayek\ AU\ Perkotaan}{Panjang\ Jalan\ di\ Jabodetabek}$$

Data panjang trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km sebagaimana disajikan pada lampiran 1. Sementara itu data panjang jalan di wilayah Jabodetabek dihimpun dari data yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tiap wilayah pada interval waktu tahun 2019-2021. Berikut data panjang jalan di wilayah Jabodetabek.

Tabel 2.2. Panjang Jaringan Jalan di Wilayah Jabodetabek

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Jakarta Timur	22,0	1.496,0	-
Jakarta Barat	12,0	1.170,0	-
Jakarta Selatan	14,0	1.986,0	-
Jakarta Utara	46,1	88,5	979,8
Jakarta Pusat	10,5	90,9	564,8
Kota Bogor	29,0	10,5	758,9
Kab. Bogor	118,0	107,3	1.748,9
Kota Depok	-	-	547,64
Kota Tangerang	18,4	31,8	306,5
Kota Tangerang	9,8	51,6	384,7
Kab. Tangerang	27,7	108,3	992,6
Kota Bekasi	13,6	22,0	4.573,5
Kab. Bekasi	29,0	31,5	953,3
Total	17.355,1		

Berdasarkan data tersebut, penghitungan IKK1 Konektivitas angkutan umum berbasis jalan adalah:

$$IKK1 = \frac{12.759{,}3\ Km}{17.355{,}1\ Km}$$
$$= 73{,}5\%$$

b) IKK2 Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel.

Kereta api perkotaan merupakan moda alternatif agar pergerakan masyarakat tidak seluruhnya berfokus pada jalan raya. Kereta perkotaan seperti KRL dapat mencapai jarak yang lebih jauh dengan tarif yang relatif murah sehingga konektivitas angkutan berbasis rel menjadi unsur yang vital dalam sistem tranportasi perkotaan. Konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel diukur menggunakan rumus:

$$IKK2 = \frac{Panjang\ Jalan\ Rel\ KA\ Perkotaan}{Luas\ Wilayah\ Jabodetabek}$$

Data panjang rel adalah sepanjang 264,882 Km dengan detail disajikan pada lampiran 2.

Tabel 2.3. Panjang Jaringan Rel di Wilayah Jabodetabek

Moda	Panjang Rel KA Perkotaan
KRL	193,152
MRT	21,5
LRT	50,23
Total	264,882

Sementara itu, luas wilayah Jabodetabek adalah seluas 6.437,89Km^2. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh penghitunagn untuk IKK2 Rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel:

$$IKK2 = \frac{264{,}882\ Km}{6.437{,}89\ Km^2}$$
$$= 0{,}04114$$

c) IKK3 Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi

Integrasi dilaksanakan sebagai bentuk sistem *seamless transportation* sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Adanya integrasi membuat perpindahan moda pada saat perjalanan ke tempat tujuan menjadi lebih mudah dan nyaman. Untuk itu diperlukan adanya integrasi antar simpul transportasi perkotaan. Persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi diukur dengan rumus:

$$IKK3 = \frac{\sum Simpul\ Utama\ dengan\ Akses\ ke\ dan\ dari\ Simpul\ Pengumpan}{\sum Simpul\ Utama\ di\ Jabodetabek}$$

Jumlah simpul utama yang telah memiliki akses ke dan dari simpul pengumpan adalah sejumlah 55 simpul, sementara total simpul utama di Jabodetabek adalah 146 simpul dengan detail disajikan dalam lampiran 3.

Tabel 2.4. Data Integrasi Simpul Transportasi di Jabodetabek

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Total Simpul	Jumlah Simpul Terintegrasi
DKI Jakarta	98	41
Bekasi Raya	12	4
Kota Depok	6	3
Bogor Raya	14	2
Tangerang Raya	16	5
Total	**146**	**55**

Berdasarkan data tersebut, penghitungan IKK3 Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi adalah:

$$IKK3 = \frac{55}{146}$$
$$= 37{,}7\%$$

Diketahui bahwa IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek ditunjang oleh tiga IKK lain. Data capaian IKK penunjang IKP1 adalah sebagai berikut:

- Nilai IKK1 sebesar 73,5
- Nilai IKK2 sebesar 0,0411
- Nilai IKK3 sebesar 37,7

Dengan data tersebut, diperoleh penghitungan IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek:

$$IKP1 = (30\% \times \frac{73{,}5}{100}) + (30\% \times 0{,}0411) + (40\% \times \frac{37{,}7}{100})$$
$$IKP1 = 0{,}3836$$

Dari perhitungan didapat nilai Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,3836. Hasil capaian dari IKP1 mencapai 100,16% dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 0,3830.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya, akan dilaksanakan penataan integrasi simpul transportasi di Jabodetabek. Penataan ini dilaksanakan terhadap seluruh stasiun LRT Jabodebek yang akan beroperasi pada tahun 2023. Selain itu juga akan dilakukan inventarisasi

integrasi pada stasiun KRL serta inventarisasi kebutuhan integrasi stasiun MRT pada pembangunan MRT phase 2

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Analisis Capaian Kinerja

Parameter umum yang saat ini digunakan oleh seluruh institusi pemerintah dalam penentuan Indeks Kepuasan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun kegunaan dari survei indeks kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja masing masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Rentang nilai IKM yang digunakan adalah nilai 1—100 dengan kategori mutu A s.d. D. Nilai 0,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik (D); Nilai Interval IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik (C); Nilai Interval IKM 76,61-89,99 artinya kinerja unit pelayanan Baik (B); Nilai Interval IKM 90-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik (A). Terdapat 8 (delapan) unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat di mana terdapat atribut pertanyaan untuk mewakili unsur-unsur tersebut. Atribut pertanyaan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam jasa pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.5. Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
1	**Informasi**	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik
2	**Persyaratan**	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini
3	**Prosedur/Alur**	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan
4	**Waktu Penyelesaian**	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini
5	**Tarif/Biaya**	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan
6	**Sarana Prasarana**	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan
7	**Respon**	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
		unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat
8	**Konsultasi dan Pengaduan**	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

Berdasarkan delapan unsur pelayanan dan atribut pertanyaan tersebut, dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek melalui aplikasi 3AS *Case Survey Management System*.

Tempat dilaksanakannya pengukuran kepuasan masyarakat atas kinerja BPTJ antara lain:

1. Terminal Tipe A Jatijajar;
2. Terminal Tipe A Baranangsiang;
3. Terminal Tipe A Pondok Cabe;
4. Terminal Tipe A Poris Plawad.

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dari total 1.205 responden maka di peroleh nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut.

Tabel 2.6. Penilaian Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	**Informasi**	92,60
2	**Persyaratan**	92,02
3	**Prosedur/Alur**	91,43
4	**Waktu Penyelesaian**	92,71
5	**Tarif/Biaya**	92,81
6	**Sarana Prasarana**	91,58
7	**Respon**	92,16
8	**Konsultasi dan Pengaduan**	93,14
Nilai Indeks Unit Pelayanan		**92,31**

Detail hasil survei disajikan dalam lampiran 4. Kemuadian berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil nilai diatas sebesar “92,31,” maka mutu pelayanan yang didapat adalah bernilai “A”

b. Sehingga berdasarkan mutu pelayanan diatas, maka kinerja unit pelayanan dapat di kategorikan “Sangat Baik.”

3. *On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Analisis Capaian Kinerja

OTP menunjukkan rasio antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan rekapitulasi atas waktu kedatangan dan keberangkatan bus dan kereta api.

Penghitungan OTP dilaksanakan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan angkutan kereta komuter Jabodetabek. Data OTP pada masing-masing moda transportasi yang diperoleh dari Perusahaan Otobus sebagai operator bus dan PT. Kereta Commuter Indonesia sebagai operator kereta api perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. On Time Performance Bus Perkotaan

No.	Jenis Layanan	Jml. Perjalanan	Jml. Perjalanan Tepat Waktu	% Perjalanan Tepat Waktu
1	Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	4.766	4.202	88,17%
2	Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	986	894	90,67%
3	Transjabodetabek	1.224	925	75,57%
Total		**6.976**	**6.021**	**86,31%**

Berdasarkan data pada tabel diatas, diperoleh nilai IKK8 Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu sebesar 86,31%.

Tabel 2.8. On Time Performance Kereta Api Perkotaan

Bulan	Jml Perjalanan	Jml Perjalanan Tepat Waktu	Persentase Ketepatan Waktu
Januari	33.325	30.713	92,2%
Februari	29.988	27.028	90,1%
Maret	33.728	30.611	90,8%
Rata-Rata			**91%**

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diperoleh nilai IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu sebesar 91%

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dihitung dengan rumus:

$$IKP2.2 = (50\% \times IKK8) + (50\% \times IKK9)$$
$$IKP2.2 = (50\% \times 86{,}31) + (50\% \times 91)$$
$$IKP2.2 = 88{,}66\%$$

Nilai akhir On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah 88,66% atau tercapai sebesar 109,46% dari target triwulan I tahun 2023 senilai 81%.

Untuk mempertahankan kinerja *On Time Performance* Transportasi Perkotaan pada periode berikutnya, beberapa langkah yang perlu dilaksanakan oleh BPTJ yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja layanan operator bus dan kereta api;
2. Memberikan apresiasi kepada operator dengan layanan yang baik, dan memberikan teguran kepada operator dengan layanan yang kurang memuaskan.

4. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan

Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek diwujudkan dengan persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan lalu lintas dalam 10.000 keberangkatan. Persentase ini membandingkan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan bus perkotaan dengan jumlah total perjalanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek. Data kecelakaan bus perkotaan diperoleh atas hasil koordinasi dengan perusahaan otobus (Transjabodetabek, JRC, dan JAC) sebagai operator bus perkotaan.

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP3 persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan lalu lintas dalam 10.000 keberangkatan dihitung menggunakan rumus:

$$IKP3 = 100\% - \left(\frac{\sum Kecelakaan\ Bus\ Perkotaan\ Jabodetabek}{\sum Trip\ Bus\ Perkotaan\ Jabodetabek/10.000}\right)$$

Hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2023 masih belum dapat dihitung karena keterbatasan data yang diperoleh dari operator bus

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan selanjutnya, beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh BPTJ adalah:

1. Koordinasi antara penyusun laporan bersama penanggung jawab data perihal metode pengumpulan data secara berkala
2. Koordinasi dengan operator bus untuk dapat melaporkan data secara lengkap dan rutin

5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025. *Grand Design* menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan public oleh pejabat di instansi pemerintah;
2. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang paling baik;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proakif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tingkat reformasi birokrasi sebuat unit pemerintah diukur dengan indeks reformasi birokrasi yang didapatkan dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

PMPRB memberikan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana

5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pada periode triwulan I tahun 2023, belum dilaksanakan PMPRB tahun 2023. Saat ini BPTJ masih menunggu informasi dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan sebagai koordinator di level kementerian perihal pelaksanaan PMPRB tahun 2023. Sebagai informasi tambahan, nilai indeks reformasi birokrasi BPTJ dari hasil PMPRB tahun 2022 adalah senilai 31,88

B. REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran BPTJ pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.259.712.953.000 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). rincian anggaran per jenis belanja beserta realisasi per Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi Triwulan I	%
Belanja Pegawai	26.180.415.000	8.441.705.011	32,24%
Belanja Barang	152.993.391.000	26.010.115.170	17,00%
Belanja Modal	80.539.147.000	8.734.962.826	10,85%
Total	259.712.953.000	43.186.783.007	16,63%

2. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Anggaran BPTJ sampai dengan bulan Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp.43.186.783.007 atau 16,63% terhadap pagu total. Kurva perbandingan target, realisasi, dan realisasi tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut.

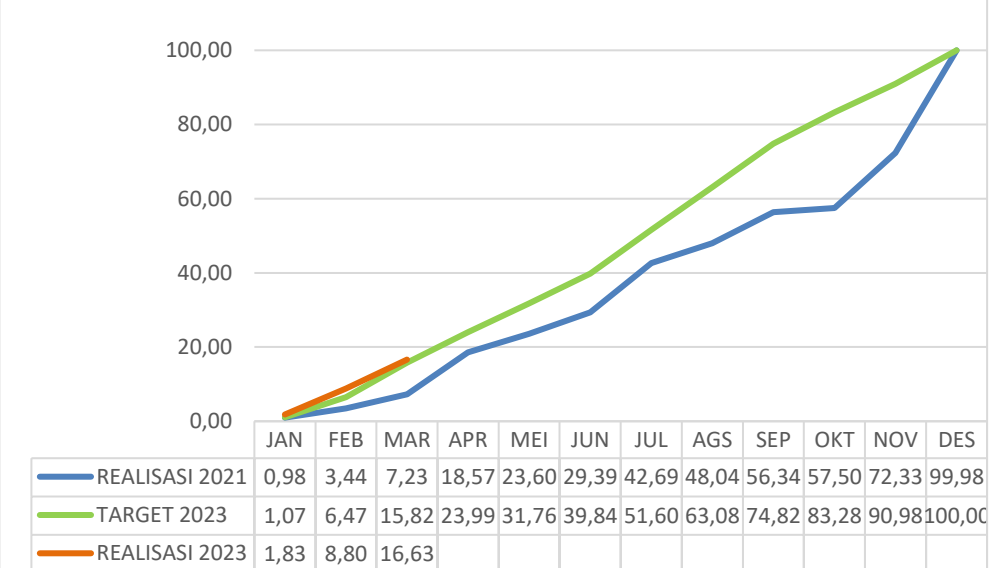

Gambar 2.1. Kurva Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan BPTJ Triwulan I Tahun 2023

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Triwulan I Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	39.822.376.000	716.239.862	1,80%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	119.376.779.000	15.973.470.379	13,38%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	5.422.640.000	870.563.556	16,05%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	24.313.286.000	8.099.641.380	33,31%
IKP5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	70.777.872.000	17.526.867.830	24,76%
Total	259.712.953.000	43.186.783.007	16,63%

Capaian Kinerja Anggaran BPTJ pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 16,63%

3. Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Penghitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^{n}[(AA\ Program_i \times COP_i) - RA\ Program_i]}{\sum_{i=1}^{n} AA\ Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP : Efisiensi Output Program
AA Program : Alokasi Anggaran
RA Program : Realisasi Anggaran
COP : Capaian Output Program
n : Jumlah Output Program

Berikut adalah penghitungan efisiensi anggaran periode Triwulan I Tahun 2023.

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^{n}[(AA\ Program_i \times COP_i) - RA\ Program_i]}{\sum_{i=1}^{n} AA\ Program_i} \times 100\%$$

$$EOP = \frac{(160.431.371.129) - 43.186.783.007}{259.712.953.000} \times 100\%$$

$$EOP = 45{,}14\%$$

Detail penghitungan *AA Program x COP* dan efisiensi anggaran per Indikator Kinerja Program disajikan dalam lampiran 5.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Pada Triwulan I Tahun 2023, didapatkan adanya efisiensi anggaran sebesar 45,14%. Nilai efisiensi anggaran pada Triwulan I Tahun 2023 juga dipengaruhi oleh jumlah realisasi anggaran yang baru terserap sebagian.

BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2023, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung dimana tiga IKP telah mencapai target dan terdapat dua IKP yang masih belum tercapai secara penuh. IKP yang belum tercapai tersebut adalah Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan, dan Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
2. Adapun rincian capaian masing-masing IKP pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:
    a. IKP1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek terealisasi sebesar 0,3836 (target 0,3836);
    b. IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 92,31 (target 92,23);
    c. IKP2.2. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 88,66 (target 81);
    d. IKP3. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan realisasinya belum dapat dihitung (target 92,41);
    e. IKP5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek realisasinya belum dapat dihitung (target 31,88)
3. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp.43.186.783.007 dari pagu Rp.259.712.953.000 atau telah mencapai 16,63%

B. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Selain itu juga akan dilakukan koordinasi bersama penanggung jawab data agar validitas data pada laporan dapat terjaga dengan baik.

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA

Sekretariat BPTJ

2023
LAPORAN TRIWULAN I

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **"Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023"** dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon II telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan selama triwulan I tahun 2023 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu triwulan I tahun 2023.

Jakarta, 2023

SEKRETARIS
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JABODETABEK

Agung Raharjo
NIP. 19631018 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
DAFTAR TABEL **5**
BAB I PENDAHULUAN **6**
1.1. LATAR BELAKANG 6
1.2. PERJANJIAN KINERJA 7
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA **9**
2.1. CAPAIAN KINERJA 9
2.1.1. IKK12 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 10
2.1.2. IKK13 Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 11
2.1.3. IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 12
2.1.4. IKK15 Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 13
2.1.5. IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 15
2.1.6. IKK17 Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 16
2.1.7. IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 17
2.1.8. IKK19 Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 18
2.1.9. IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan 20
2.1.10. IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ 20
2.2. REALISASI ANGGARAN 22
BAB III PENUTUP **26**
LAMPIRAN **28**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ berdasarkan PK Tahun 2023 8

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2023 9
Tabel 2. 2 Tabel Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTJ 10
Tabel 2. 3 Hasil Survei Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ 12
Tabel 2. 4 Hasil Survei Penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPTJ.....14
Tabel 2. 5 Nilai IKPA BPTJ s.d. Triwulan I.....15
Tabel 2. 6 Data Penetapan Status Penggunaan (PSP) s.d. TW I 16
Tabel 2. 7 Data Perhitungan Capaian Layanan Perkantoran BPTJ 17
Tabel 2. 8 Data Capaian Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....19
Tabel 2. 9 Tabel Penggabungan Nilai IKK Bagian Humas Triwulan I Tahun 2023.....20
Tabel 2. 10 Data Capaian Indeks Pengawasan BPTJ 21
Tabel 2. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2023.....22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, yang kemudian pertanggungjawaban ini dituangkan kedalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit kerja Eselon II yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

(1). Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan;

(2). Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan danpenelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

(3). Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan

(4). Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi,serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015, yang kemudian selanjutnya dibentuk Sekretariat BPTJ berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2018. PM Nomor 110 Tahun 2018 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

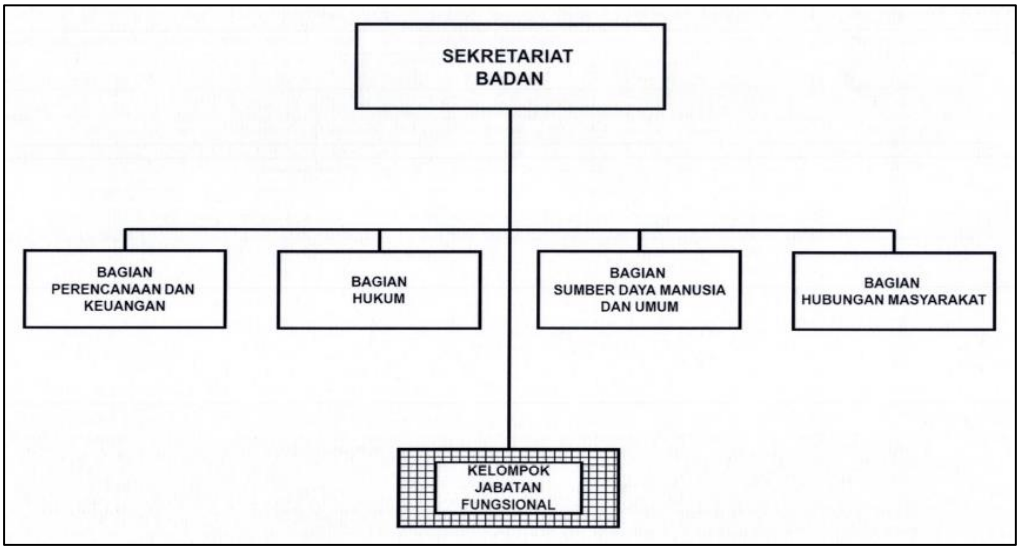

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Sekretariat BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Rencana Strategis Sekretariat BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi Sekretariat BPTJ. Sekretariat BPTJ pada Triwulan I tahun 2023 memiliki sepuluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan *core business* dan menjadi dasar analisis capaian kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2023. Hal ini juga merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi *outcome.* Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan dukungan manajemen sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat BPTJ telah menetapkan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Sasaran Kegiatan Sekretariat BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan. Berikut target indikator kinerja kegiatan Sekretariat BPTJ berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ berdasarkan PK Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	**SK6** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	**IKK12** Nilai SAKIP BPTJ	Nilai	76
2.	**SK7** Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	**IKK13** Nilai Maturitas SPIP BPTJ	Nilai	3,907
3.	**SK8** Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	**IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	Indeks	76
		IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	Indeks	77
4.	**SK9** Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	**IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	Indeks	91
		IKK17 Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	Indeks	87
		IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	%	72
		IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	Indeks	73
5.	**SK10** Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	**IKK19** Nilai Reputasi Positif BPTJ	Nilai	75
6.	**SK11** Terwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif di BPTJ	**IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	%	78

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengetahui realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPTJ Tahun 2023 dapat tercapai.

Adapun target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan I Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi Tw I	Capaian Kinerja
1.	**IKK12** Nilai SAKIP BPTJ	Nilai	76	-	74,96*	*Tidak dapat dibandingkan*
2.	**IKK13** Nilai Maturitas SPIP BPTJ	Nilai	3,907	-	3,907*	*Tidak dapat dibandingkan*
3.	**IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	Indeks	76	22	74,75*	*Tidak dapat dibandingkan*
	IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	Indeks	77	22	76,18*	*Tidak dapat dibandingkan*
4.	**IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	Indeks	91	50	97,03	194%
	IKK17 Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	Indeks	87	50	96,69	193%
	IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	%	72	69	76,93*	*Tidak dapat dibandingkan*
	IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	Indeks	73	69	70,37*	*Tidak dapat dibandingkan*

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi Tw I	Capaian Kinerja
5.	**IKK19** Nilai Reputasi Positif BPTJ	Nilai	75	18,75	37,16	198%
6.	**IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	%	78	19,5	76,47*	*Tidak dapat dibandingkan*

Catatan:
** = menggunakan capaian tahun lalu*

2.1.1. IKK12 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sebagai bentuk penguatan akuntabilitas, perlu adanya evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tujuannya adalah untuk memastikan pertanggungjawaban dan pelaksanaan SAKIP mulai dari penetapan, pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan kinerja terlaksana dengan baik dan berorientasi pada hasil. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memiliki kualitas yang baik alam pelayanan publik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPTJ diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal No: PS.309/1/1/ITJEN/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTJ, Nilai AKIP BPTJ sebesar 74,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTJ

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		Evaluasi Tahun 2021		Evaluasi Tahun 2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,20%	30%	22,15%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,58%	30%	21,45%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,94%	15%	10,85%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	8,26%	25%	20,50%
5.	Capaian Kinerja	20%	11,13%	-	-
Nilai akuntabilitas Kinerja		100%	70,10%	100%	74,96%
Predikat		**BB**		**BB**	

Hasil Evaluasi SAKIP BPTJ tahun 2022 sebesar 74,96% dengan predikat BB (Sangat Baik).

Penilaian SAKIP BPTJ tahun 2023 akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan Triwulan I ini Sekretariat BPTJ masih melakukan proses pengumpulan data dukung untuk penilaian SAKIP dimaksud.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan penilaian SAKIP tahun 2023 sebagai berikut:

- Koordinasi dengan tim evaluator terkait optimalisasi capaian Nilai AKIP BPTJ, serta melaksanakan rapat diskusi pembahasan reviu LKIP di lingkungan BPTJ
- Koordinasi dengan Direktorat dan Bagian di lingkungan BPTJ terkait pengumpulan kelengkapan data SAKIP yang nantinya dijadikan sebagai data dukung implementasi SAKIP
- Melaksanakan Monitoring pada aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, E-Sakip Reviu, E-planning, dan Krisna
- Optimalisasi pelaksanaan evaluasi internal terkait implementasi SAKIP

2.1.2. IKK13 Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian dilaksanakan secara Mandiri oleh Tim Satuan Tugas SPIP dan dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal sebelum nantinya akan dievaluasi oleh BPKP.

Berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) yang dilaksanakan tahun 2022, didapatkan hasil maturitas SPIP BPTJ sebesar 3,907 dengan kriteria “Terdefinisi”. Selanjutnya hasil PM disampaikan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) yaitu memberikan suatu penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap penilaian yang telah dilakukan secara mandiri, sebelum diberikan kepada evaluator (BPKP). Hasil PenjaminanKualitas menunjukkan hasil yang sama dengan Penilaian Mandiri yaitu sebesar 3,907 dengan kriteria “Terdefinisi”.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan SPIP tahun 2023 sebagai berikut:

- Melaksanakan asistensi pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP
- Melaksanakan pemantauan progress pengisian kertas kerja SPIP BPTJ
- Koordinasi dengan tim PM masing-masing Direktorat dan Bagian di lingkungan BPTJ terkait kelengkapan data dukung SPIP BPTJ

2.1.3. IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Dalam rangka mengukur Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ, telah digunakan metode survei dengan menyebar angket kepada para pegawai di lingkungan BPTJ. Telah ditentukan indeks dengan skala 1-100, dimana seluruh ASN di lingkungan BPTJ memberikan penilaian skala 1-100 terhadap setiap layanan yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian dan Organisasi. Survei dilaksanakan pada Semester I tahun 2022 (tahunan) dan telah diisi oleh 147 PNS di lingkungan BPTJ. Adapun hasil dari survei dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Hasil Survei Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ

NO	KEGIATAN KEPEGAWAIAN	Rata-Rata Hasil Survei	Capaian
1	**Pengelolaan Kepegawaian dan RB**		**74.56**
	➢ Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (Kenaikan Gaji, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Pemutakhiran Data Pegawai, dll)	74,41	
	➢ Ketegasan Terhadap Sikap/Perilaku Pegawai	74,11	
	➢ Tingkat pemahaman terhadap implementasi Reformasi Birokrasi	75,17	
2	**Pengadaan Pegawai**		**74.15**
	➢ Tingkat pemahaman terhadap analisis jabatan, analisis beban kerja, dan formasi kebutuhan pegawai	74,01	
	➢ Penyelenggaraan Orientasi CPNS yang dilakukan Bagian SDM BPTJ	75,87	
	➢ Kesesuaian Formasi Penempatan Pegawai (Perencanaan Formasi dan Keputusan Mutasi) Rencana Pengembangan Kompetensi yang dilakukan Bagian SDM BPTJ	72,58	
3	**Sosialisasi**		**74.64**
	➢ Respon Bagian SDM terkait permintaan dokumen Pegawai	75,57	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan yang Diselenggarakan Bagian SDM terkait Pengisian Aplikasi seperti MySAPK	74,31	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan yang Diselenggarakan Bagian SDM terkait Pengisian Aplikasi seperti LHKPN	73,89	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan yang Diselenggarakan Bagian SDM terkait Pengisian Aplikasi seperti LHKASN	72,76	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan yang Diselenggarakan Bagian SDM terkait Reformasi Birokrasi	74,96	

NO	KEGIATAN KEPEGAWAIAN	Rata-Rata Hasil Survei	Capaian
	➢ Pemahaman terkait cuti PNS	75,53	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang dilakukan Bagian SDM BPTJ	75,36	
	➢ Pemahaman terkait Tugas Belajar	73,64	
	➢ Sosialisasi terkait Kedisiplinan ASN yang dilakukan Bagian SDM BPTJ	75,35	
	➢ Sosialisasi dan Pembinaan Penyusunan Formasi Pegawai, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja	75,57	
	➢ tingkat pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan ASN	76,76	
	➢ Tingkat pemahaman terhadap analisis jabatan, analisis beban kerja, dan formasi kebutuhan pegawai	74,01	
4	**Pendidikan dan Pelatihan**		**75.65**
	➢ Rencana Pengembangan Kompetensi yang dilakukan Bagian SDM BPTJ	72,36	
	➢ Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan pegawai	78,93	
rata-rata capaian			**74.75**

Dari hasil survei tersebut, didapatkan realisasi capaian IKK 14 Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ sebesar 74,75 (kriteria baik).

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata Kelola ASN BPTJ sebagai berikut:

- Peningkatan pemahaman terkait sistem manajemen kinerja PNS
- Asistensi pengisian data laporan kinerja (e-Lapkin)
- Asistensi penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2023
- Pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN di Lingkungan BPTJ
- Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai

2.1.4. IKK15 Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Perhitungan IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi mengukur Indeks Profesionalitas ASN BPTJ dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh ASN di lingkungan BPTJ (tahunan). Dengan menyebar kuesioner, data yang didapatkan lebih mutakhir yang nantinya akan diinput juga ke dalam aplikasi kepegawaian. Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ melalui kuesioner (4 kriteria pengukuran: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin) yang disebar pada bulan Juni 2022 dan diisi oleh 129 ASN di BPTJ. Hasil Penilaian IKK 15 Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Hasil Survei Penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPTJ

Kriteria Kualifikasi				
No	Jenjang Pendidikan	%	Bobot Indeks	Indeks
1	S3	0,70%	25	0,175
2	S2	32,60%	20	6,52
3	S1	40,30%	15	6,045
4	D-III / D-IV	13,20%	10	1,32
5	D-II / SLTA	13,20%	5	0,66
		maksimal 25		14,72
Kriteria Kompetensi				
No	Jenis Pengembangan Kompetensi	%	Bobot Indeks	Indeks
1	Diklat Pimpinan	81,50%	15	12,225
2	Diklat Fungsional	30,00%	15	4,5
3	Diklat Teknis	16,00%	22,5	3,6
4	Seminar	79,00%	10	7,9
		maksimal 62.5		28,225
Kriteria Kinerja				
No	nilai SKP	%	Bobot Indeks	Indeks
1	91-100	70,00%	30	21
2	76-90	25,00%	25	6,25
3	61-75	5,00%	20	1
4	51-60			
		maksimal 30		28,25
Kriteria Kedisiplinan				
No	Hukuman Disiplin	%	Bobot Indeks	Indeks
1	tidak ada riwayat hukuman disiplin	99,20%	5	4,96
2	ada riwayat hukuman ringan	0,80%	3	0,024
3	ada riwayat hukuman sedang		2	0
4	ada riwayat hukuman berat		1	0
		maksimal 5		4,984

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPTJ (IKK15) sebagai berikut = Kriteria Kualifikasi + Kriteria Kompetensi + Kriteria Kinerja + Kriteria Disiplin = 14,72 + 28,225 + 28,25+ 4,984= 76,179. Nilai realisasi capaian IKK 15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ sebesar 76,18.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Penyelenggaraan Profesional ASN BPTJ sebagai berikut:

- Pemantauan penegakan disiplin pegawai
- Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai
- Peningkatan kepribadian dan pengabdian ASN kepada unit kerja dan masyarakat

2.1.5. IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, sehingga rumus perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ ditetapkan 60% Ketepatan Waktu Pelaporan + 40% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Ketepatan waktu penyampaian Laporan dinilai sebesar 100 berdasarkan surat Kepala BPTJ No:KU.204/1/3/BPTJ/2023 tentang penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-E1 BPTJ Tahunan Tahun 2022 (unaudited), yaitu bahwa laporan telah disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu pada tanggal 17 Februari 2023. Sementara untuk Nilai IKPA didapatkan nilai sebesar 92,57. Nilai IKPA dihitung dari penjumlahan setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Nilai IKPA BPTJ s.d. Triwulan I

No.	Indikator	Bobot	Nilai	Jumlah
1	Revisi DIPA	10%	100	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	42,97	4,30
3	Penyerapan Anggaran	20%	100	20
4	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5	Penyelesaian Tagihan	10%	95,65	9,57
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7	Dispensasi SPM	5%	100	5
8	Capaian Output	25%	94,81	23,70
Nilai IKPA				**92,57**

Dari data tersebut, dilakukan perhitungan indeks pengelolaan keuangan BPTJ yaitu sebesar (60% x 100) + (40% x 92,57) = 97,03.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BPTJ sebagai berikut:

- Monitoring penyerapan anggaran dalam hal ini nilai realisasi anggaran dan capaian fisik. Sekretariat BPTJ melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan akan melakukan koordinasi yang intens dengan Direktorat teknis terkait percepatan realisasi dimaksud
- Monitoring pelaksanaan dan data dukung kegiatan kontraktual
- Monitoring pelasanaan realisasi dengan rencana penarikan dana

2.1.6. IKK17 Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pengelolaan Aset BPTJ mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 230 Tahun 2020 tentang Prosedur Kerja Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Sehingga rumus perhitungan Indeks Pengelolaan Aset BPTJ ditetapkan 50% x tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) + 50% x tingkat kepatuhan pelaporan terkait BMN**.** Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN.

Berdasarkan surat Kepala BPTJ No:UM.006/1/15/BPTJ/2023 tentang penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 pada BPTJ, bahwa laporan WASDAL telah disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, yaitu pada tanggal 16 Januari 2023 (terlampir surat Kepala BPTJ dimaksud). Sementara tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dihitung berdasarkan total yang telah diPSP dibagi dengan total yang harus di PSP kan. Adapun data Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN s.d. Triwulan I sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Data Penetapan Status Penggunaan (PSP) s.d. TW I

Total yang harus di psp kan	12.037
Total yang telah di psp kan s.d TW I / 2023	11.241
Perbandingan	93,38%

Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan inventarisasi BMN di lingkungan BPTJ dan didapatkan 12.037 unit/buah BMN perlu di PSP kan. Selanjutnya diajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 11.241 unit/buah BMN dan telah dilakukan koordinasi pengajuan PSP tersebut kepada KPKNL maupun Biro LPPBMN. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan presentasi pengajuan sebesar 93,38%. Dari data tersebut, realisasi capaian Indeks Pengelolaan Aset BPTJ sebesar (50% x 93,38) + (50% x 100) = 96,69%. BPTJ turut aktif memastikan percepatan terbitnya SK PSP serta melakukan koordinasi dengan Biro LPPBMN dan KPKNL Jakarta I. Adapun kendala yang dialami yaitu data dukung usulan PSP BMN yang sangan rigit perBMN yang diusulkan (foto BMN dan Bukti kepemilikan BMN). Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan koordinasi yang intens dengan penanggungjawab BMN.

2.1.7. IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Terkait IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ, diukur melalui kuesioner yang disebar ke para pegawai di lingkungan BPTJ (metode survei). Pertanyaan pada kuisioner dikonsep sedemikian rupa sehingga dapat mewakili tingkat kuaitas penyelenggaraan perakantoran di BPTJ. Hasil dari kuisioner tersebut nantinya akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%). 5 (lima) indikator penilaian kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ sebagai berikut:

a. Pemenuhan Penilaian terhadap pemenuhan Kebutuhan kantor (Seperti ATK, Toner, seragam dan kebutuhan snack rapat)
b. Penilaian terhadap penanganan /pengendalian pandemi covid 19 (Seperti pembagian paket perlengkapan penunjang daya tahan tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan)
c. Penilaian terhadap Peningkatan Perangkat Komputer
d. Penilaian terhadap manfaat atas pengadaan peralatan dan mesin
e. Penilaian terhadap pelayanan sentral surat

Survei telah diisi oleh 231 pegawai di lingkungan BPTJ, adapun hasil dari kuisioner tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Data Perhitungan Capaian Layanan Perkantoran BPTJ

No	Uraian Kegiatan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Capaian Akhir
1	Penilaian terhadap pemenuhan Kebutuhan kantor (Seperti ATK, Toner, seragam dan kebutuhan snack rapat)	4,76%	27,27%	50,65%	17,32%	70,13
	Penilaian Responden	25	50	75	100	
	Jumlah Capaian	1,19	13,635	37,988	17,32	
2	Penilaian terhadap penanganan /pengendalian pandemi covid 19 (Seperti pembagian paket perlengkapan penunjang daya tahan tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan)	0,87%	11,26%	53,68%	34,20%	80,31
	Penilaian Responden	25	50	75	100	
	Jumlah Capaian	0,2175	5,63	40,26	34,2	
3	Penilaian terhadap Peningkatan Perangkat Komputer	8,66%	24,24%	49,78%	17,32%	68,94
	Penilaian Responden	25	50	75	100	
	Jumlah Capaian	2,165	12,12	37,335	17,32	

No	Uraian Kegiatan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Capaian Akhir
4	Penilaian terhadap manfaat atas pengadaan peralatan dan mesin	3,90%	22,94%	52,81%	20,35%	72,40
	Penilaian Responden	25	50	75	100	
	Jumlah Capaian	0,975	11,47	39,608	20,35	
5	Penilaian terhadap pelayanan sentral surat	1,30%	14,72%	55,84%	28,14%	78,06
	Penilaian Responden	25	50	75	100	
	Jumlah Capaian	0,325	7,36	41,88	28,49	
Rata-Rata Capaian						73,97

Didapatkan realisasi capaian sebesar 73,97. Bahwa penilaian tertinggi terdapat pada indikator penanganan/pengendalian pandemi covid 19 (seperti pembagian paket perlengkapan penunjang daya tahan tubuh) dengan nilai 80,31. Sementara penilaian terendah terdapat pada indikator Peningkatan Perangkat Komputer dengan nilai 68,94.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perkantoran BPTJ akan dilakukan monitoring terhadap pelayanan sentral surat, pelayanan terhadap kebutuhan kantor, kebutuhan paket perlengkapan penunjang daya tahan tubuh, dan peningkatan peralatan dan mesin.

2.1.8. IKK19 Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Rumus Perhitungan yang digunakan untuk Nilai Reputasi Positif BPTJ adalah enam puluh persen (60%) bobot nilai positif kegiatan pemberitaan media massa dan pengelolaan media sosial yang berasal dari output dan outcome kegiatan **Pemberitaan Media Massa** dan **Pengelolaan Media Sosial,** Empat puluh persen (40%) bobot nilai positif kegiatan publikasi dan dokumentasi dan kegiatan pelayanan informasi publik yang berasal dari output dan outcome kegiatan **Publikasi dan dokumentasi** serta **Pelayanan Informasi Publik**. Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari:

1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial
2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik

Adapun realisasi capaian sampai dengan triwulan I sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Data Capaian Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Komponen	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Output Pemberitaan	79	0,052	Cukup	C
Outcome Pemberitaan	100%	1,00	Sangat Baik	A
Output Media Sosial	81	-0,13	Sangat Kurang	E
Outcome Media Sosial	77,00%	0,77	Baik	B
Jumlah Normalisasi Nilai				1,692
Rata-rata Nilai Subbag I				0,423
Bobot 60%				0,2538
Pembulatan				25,38

Komponen	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Output dan Outcome Publikasi & Dokumentasi				
Output Placement	2	0,50	C	Cukup
Outcome Placement	-	-	-	-
Output Talkshow	2	0,50	C	Cukup
Outcome Talkshow	868359	0,43	D	Kurang
Output Spanduk	80	0,20	E	Sangat Kurang
Outcome Spanduk	-	-	-	-
Output Brosur	-	-	-	-
Outcome Brosur	-	-	-	-
Output Poster	18	0,50	C	Cukup
Outcome Poster	-	-	-	-
Output Dokumentasi	33	0,24	D	Kurang
Outcome Dokumentasi	-	-	-	-
Output Album	-	-	-	-
Outcome Album	-	-	-	-
Output Video	1	0,10	E	Sangat Kurang
Outcome Video	-	-	-	-
Output dan Outcome Pelayanan Informasi Publik				
Output Website	19	0,20	D	Kurang
Outcome Website	14.421	0,07	D	Kurang
Output PPID	6	0,42	C	Cukup
Outcome PPID	630	0,08	E	Kurang Sekali
Jumlah Normalisasi Nilai				3,24

Komponen	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Rata-rata Nilai Subbag II				0,29
Bobot 40%				0,12
Pembulatan				11,78

Tabel 2. 9 Tabel Penggabungan Nilai IKK Bagian Humas Triwulan I Tahun 2023

PENGGABUNGAN NILAI IKK HUMAS TAHUN 2023		
1	Nilai Positif Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial TW I Tahun 2023	**25,38**
2	Nilai Positif Publikasi & Pelayanan Informasi TW I Tahun 2023	**11,78**
TOTAL NILAI AKHIR		**37,16**

Rencana Tindak Lanjut berkaitan dengan Nilai Reputasi Positif BPTJ sebagai berikut:

- Monitoring sistem pengelolaan pelayanan informasi melalui CC 151 secara berkala
- Publikasi dengan memetakan isu terkait transportasi di Jabodetabek
- Pengelolaan dan Pengembangan website BPTJ secara berkala
- Penyusunan Konten oleh Tim Humas BPTJ
- Koordinasi secara kontinyu dengan PPID Utama dalam pelaksanaan PPID di Lingkungan BPTJ

2.1.9. IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan

Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan menjadi Peraturan dihitung berdasarkan jumlah rancangan peraturan yang disahkan dibagi dengan jumlah rancangan yang diajukan. Sampai dengan Triwulan I, Bagian Hukum telah melakukan pengumpulan dan perhitungan data terkait Dokumen Rancangan Peraturan yang telah disahkan.

Capaian sampai dengan triwulan I yaitu 6 peraturan yang disahkan dari total 9 peraturan yang diajukan (data terlampir), terkait hal ini masih perlu dilakukan monitoring terhadap rancangan peraturan yang belum disahkan (hold) yaitu sebanyak 3 rancangan peraturan (rincian peraturan sebagaimana terlampir). Secara umum, rancangan peraturan yang di-*hold* masih dalam proses penyempurnaan dan koordinasi dengan Direktorat terkait, sebelum nantinya dilakukan finalisasi peraturan. Rencana tindak lanjut terkait persentase dokumen rancangan peraturan yang telah disahkan menjadi peraturan adalah Bagian Hukum akan melakukan koordinasi dan monitoring untuk menjaga agar capaian tetap berada di atas target.

2.1.10. IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ

Perhitungan Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Untuk perhitungan kearsipan di lingkungan BPTJ dilakukan pada pertengahan tahun (semester I tahun berjalan), sehingga capaian yang digunakan pada triwulan I 2023 adalah capaian tahun 2022 dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Data Capaian Indeks Pengawasan BPTJ

No.	Objek Audit Kearsipan	Nilai (%)	Kategori
A	Unit Pengolah		
1.	Sekretariat BPTJ	81,82	Memuaskan
2.	Direktorat Angkutan	76,69	Memuaskan
3.	Direktorat Lalu Lintas	67,23	Baik
4.	Direktorat Prasarana	73,72	Sangat Baik
	Nilai Rata-Rata Unit Pengolah	74,86	Sangat Baik
B	Unit Kearsipan		
1.	Sekretariat BPTJ	65,88	Baik
Nilai Pengawasan		70,37	Sangat Baik

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan nilai audit system kearsipan internal yang dilakukan di lingkungan BPTJ adalah 70,37 dengan kategori “Sangat Baik”. Hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022 menggambarkan kondisi pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan BPTJ.

Rencana tindak lanjut berkaitan dengan Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ sebagai berikut:

- Peningkatan pemahaman para pegawai di lingkungan BPTJ terkait pengawasan kearsipan
- Monitoring pelaksanaan arsip di lingkungan BPTJ

2.2. REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan Triwulan I, anggaran Sekretariat BPTJ telah terealisasi sebesar Rp.17.526.867.830 atau 24,76% dari anggaran sebesar Rp.70.777.872.000. Adapun realisasi per Indikator Kinerja Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan I		
	Anggaran	Realisasi	%
IKK12 Nilai SAKIP BPTJ	2.315.805.000	197.525.537	8,53%
IKK13 Nilai Maturitas SPIP BPTJ	739.584.000	16.083.344	2,17%
IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	2.418.324.000	1.309.659.683	54,16%
IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	750.715.000	60.972.354	8,12%
IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	965.000.000	350.099.150	36,28%
IKK17 Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	564.475.000	155.294.500	27,51%
IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	57.862.303.000	14.187.925.484	24,52%
IKK19 Nilai Reputasi Positif BPTJ	2.684.623.000	278.026.175	10,36%
IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	2.239.975.000	858.830.317	38,34%
IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ	237.068.000	112.451.286	47,43%
Total	70.777.872.000	17.526.867.830	24,76%

Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. **IKK12** Nilai SAKIP BPTJ meliputi kegiatan:
   - penyusunan dan Harmonisasi RKA
   - Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
   - Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 di Lingkungan BPTJ
   - Forum Komunikasi Pengelolaan SPIRIT Jabodetabek

2. **IKK13** Nilai Maturitas SPIP BPTJ meliputi kegiatan:
   - Rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2023
   - Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023
   - Pemantauan progress pengisian KK SPIP di lingkungan BPTJ

3. **IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ meliputi kegiatan:
   - Menyusun formasi Penyusunan Rencana Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022
   - Pendampingan Pengisian Data Laporan Kinerja (e-Lapkin) Tahun 2022 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
   - kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan di Lingkungan BPTJ Tahun 2023
   - Penyusunan Kebutuhan ASN di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
   - Melaksanakan Tugas sebagai Tim Monitoring Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis di Kanreg dan UPT BKN
   - Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS

4. **KK15** Indeks Profesionalitas ASN BPTJ meliputi kegiatan:
   - Kegiatan Pembahasan Kebutuhan Pelatihan Teknis di Lingkungan BPTJ
   - Pembahasan Kerjasama Pelatihan Teknis di Lingkungan BPTJ

5. **IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ meliputi kegiatan:
   - Penyusunan bahan rapim terkait daya serap
   - Penyelesaian proses revisi DIPA dan POK
   - Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2022 pada UAPPA - E1 BPTJ
   - Pembahasan Usulan Revisi DIPA/POK Triwulan I pada Satker Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023
   - Pembahasan Prosedur Analitis dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2022 Tingkat UAPPA/B-E1 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (audited)
   - Pembahasan Penyusunan Surat Keputusan dan Perjanjian Sewa BMN di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
   - Evaluasi Capaian PNBP dan Realisasi Anggaran Triwulan I TA 2023 di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
   - Pembahasan Revisi Hal III DIPA untuk Periode Triwulan II TA 2023 di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

6. **IKK17** Indeks Pengelolaan Aset BPTJ meliputi kegiatan:
   - Telah dilaksanakan inventarisasi bmn BPTJ lima tahunan;
   - Telah terbitnya SK PSP
   - Pembahasan Usulan Penghapusan ATB di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

7. **IKK18** Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ meliputi kegiatan:
   - Telah dilaksanakan perawatan kendaraan dinas
   - Pembagian paket penunjang daya tahan tubuh kepada pegawai BPTJ
   - Terpenuhinya pemeliharaan/service atas komputer di lingkungan BPTJ
   - Terpenuhinya Perlatan yang menunjang kegiatan pegawai di lingkungan BPTJ
   - Terpenuhinya dana untuk kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan
   - Terpenuhinya dana untuk tambahan penghasilan berdasarkan kinerja seperti Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Uang Lembur

8. **IKK19** Nilai Reputasi Positif BPTJ meliputi kegiatan:
   - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat melalui CC 151 pada Layanan JR dan JA Connexion di Wilayah Bodetabek tahun 2023 s.d bulan Februari
   - Pembahasan Evaluasi Contact Center 151 BPTJ Tahun 2022
   - Penyusunan Daftar Informasi Publik berupa Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Informasi Berkala, dan Daftar Informasi Dikecualikan untuk PPPID BPTJ Tahun 2023;
   - Dukungan Publikasi dalam bentuk media luar ruang pada sektor transportasi dalam rangka gerakan “Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI)
   - Penyelenggaraan BPTJ Festival 2023 untuk mendorong masyarakat dalam menggunakan transportasi umum pada mobilitas sehari-hari dan memanfaatkan terminal sebagai ruang publik
   - Pengelolaan pemberitaan melalui wawancara CNBC Indonesia dan melalui Koran SINDO
   - Penyusunan content media sosial terkait transportasi (total 55 konten media social)
   - Pengelolaan, Pengembangan dan Penyusunan Konten Website BPTJ periode Januari - Maret 2023
   - Penyelenggaraan Gerakan Jalan Hijau pada tahun 2023 yaitu dengan Mendorong Kembali Penggunaan Transportasi Publik Pasca Berakhirnya PPKM. Pada tahun 2023, Gerakan Jalan Hijau Hadir dalam bentuk Talkshow Hybrid Radio, Advertorial, Campaign Di Media Sosial & Mainstream, Serta Pemberitaan Media Online dengan Total Partisipan: ± 300 Orang dan Total Pemberitaan: ± 50 Pemberitaan, mengambil tema " Mendorong Kembali Penggunaan Transportasi Publik Pasca Berakhirnya PPKM"

9. **IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan meliputi kegiatan:
   - Rapat Penyusunan Bahan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029
   - Sosialisasi UU No. 13 TA 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 TA 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
   - Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama yang telah Diterbitkan di Lingkungan BPTJ
   - Finalisasi dan Persiapan Penandatanganan Naskah bersama BPTJ dengan Dishub DKI Jakarta PT KCI dan PPD tentang Penyediaan Data dan Informasi Perjalanan Penumpang Angkutan Massal di Wilayah Jabodetabek

- Bimbingan Teknis Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan Dokumen JDIH di Lingkungan BPTJ
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

10. **IKK21** Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ meliputi kegiatan:
    - Bimbingan Teknis Kearsipan BPTJ Tahun 2023
    - Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPTJ Tahun 2023

BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023, dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2023, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung dimana tiga IKK telah mencapai target yaitu IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ, IKK17 Indeks Pengelolaan Aset BPTJ, dan IKK19 Nilai Reputasi Positif BPTJ. Kemudian terdapat tujuh IKK yang tidak dapat dibandingkan karena perhitungan dilakukan secara tahunan (menggunakan capaian tahun lalu) yaitu IKK12 Nilai SAKIP BPTJ, IKK13 Nilai Maturitas SPIP BPTJ, IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ, IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ, IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran, IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan, dan IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ
2. Adapun capaian kinerja Sekretariat BPTJ pada Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:
    a. **IKK12** Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 74,96 (target 76);
    b. **IKK13** Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 3,907 (target 3,907);
    c. **IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 74,75 (target 76);
    d. **IKK15** Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 76,18 (target 77);
    e. **IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 97,03 atau sebesar 194% (target 50);
    f. **IKK17** Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 96,69 atau sebesar 193% (target 50);
    g. **IKK18** Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 76,93 (target 72);
    h. **IKK19** Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 37,16 atau sebesar 198% (target 18,75);
    i. **IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan terealisasi sebesar 76,47 (target 78);
    j. **IKK21** Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 70,37 (target 72).
3. Sampai dengan Triwulan I, anggaran Sekretariat BPTJ telah terealisasi sebesar Rp.17.526.867.830 atau sebesar 24,76% dari anggaran sebesar Rp.70.777.872.000. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ dan realisasi anggaran terendah terdapat pada IKK13 Nilai Maturitas SPIP BPTJ

B. Saran dan Tindak Lanjut

Melaksanakan koordinasi dan persiapan data dukung perhitungan capaian IKK sebagai berikut:

1. IKK12 Nilai SAKIP BPTJ
   - Koordinasi dengan tim evaluator terkait optimalisasi capaian Nilai AKIP BPTJ, serta melaksanakan rapat diskusi pembahasan reviu LKIP di lingkungan BPTJ
   - Koordinasi dengan Direktorat dan Bagian di lingkungan BPTJ terkait pengumpulan kelengkapan data SAKIP yang nantinya dijadikan sebagai data dukung implementasi SAKIP
   - Monitoring pada aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, E-Sakip Reviu, E-planning, dan Krisna
   - Optimalisasi pelaksanaan evaluasi internal terkait implementasi SAKIP

2. IKK13 Nilai Maturitas SPIP BPTJ
   - Melaksanakan asistensi pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP
   - Melaksanakan pemantauan progress pengisian kertas kerja SPIP BPTJ
   - Koordinasi dengan tim PM masing-masing Direktorat dan Bagian di lingkungan BPTJ terkait kelengkapan data dukung SPIP BPTJ

3. IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ
   - Peningkatan pemahaman terkai t sistem manajemen kinerja PNS
   - Asistensi pengisian data laporan kinerja (e-Lapkin)
   - Asistensi penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun 2023
   - Pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN di Lingkungan BPTJ
   - Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai

4. IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ
   - Pemantauan penegakan disiplin pegawai
   - Monitoring rencana pengembangan kompetensi pegawai
   - Peningkatan kepribadian dan pengabdian ASN kepada unit kerja dan masyarakat

5. IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran
   - Monitoring terhadap pelayanan sentral surat
   - Monitoring pelayanan terhadap kebutuhan kantor (ATK)
   - Monitoring kebutuhan paket perlengkapan penunjang daya tahan tubuh
   - Monitoring peningkatan serta pemeliharaan kendaraan, peralatan, dan mesin

6. IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan
   - Monitoring pengesahan peraturan untuk menjaga capaian tetap berada di atas target
   - Koordinasi pelaksanaan ketertiban dan ketaatan pengajuan peraturan yang akan disahkan

7. IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan BPTJ
   - Peningkatan pemahaman para pegawai di lingkungan BPTJ terkait pengawasan kearsipan
   - Monitoring pelaksanaan arsip di lingkungan BPTJ

LAMPIRAN

Tabel Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan BPTJ

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
		Evaluasi Tahun 2021		Evaluasi Tahun 2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,20%	30%	22,15%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,58%	30%	21,45%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,94%	15%	10,85%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	8,26%	25%	20,50%
5.	Capaian Kinerja	20%	11,13%	-	-
Nilai akuntabilitas Kinerja		100%	70,10%	100%	74,96%
Predikat		BB		BB	

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN 1

DIREKTORAT ANGKUTAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **"Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023"** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Angkutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan IV Tahun 2022 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Angkutan selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2023

DIREKTUR ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

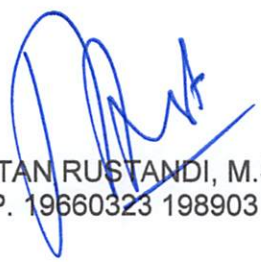

TATAN RUSTANDI, M.Sc.
NIP. 19660323 198903 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **"Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023"** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Angkutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan IV Tahun 2022 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Angkutan selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2023

DIREKTUR ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

TATAN RUSTANDI, M.Sc.
NIP. 19660323 198903 1 002

KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANGGAL	PARAF
Dikonsep	Nyamino, S.E., M.A.	Plt. Kasubbag Tata Usaha		
Diperiksa	Baju Susanto, S.Pd., M.M.	Kasubdit Angkutan Orang		
Diperiksa	Solihin Purwantara, S.SiT.	Kasubdit Angkutan Barang		
Diperiksa	Ghoefron Koerniawan, A.TD., M.T.	Kasubdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang 1
I.2. Struktur Organisasi 1
I.3. Perjanjian Kinerja 4
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 8
II.1. Pengukuran Dan Analisis Capaian Kinerja 8
II.2. Realisasi Anggaran 14
BAB III PENUTUP 19
III.1. Kesimpulan 19
III.2. Saran Dan Tindak Lanjut 19
L A M P I R A N 20

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Direktorat Angkutan 3

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ Tahun 2023 4
Tabel I. 2 Kegiatan dan Alokasi Anggaran Awal Tahun 2023..... 5
Tabel I. 3 Alokasi Anggaran Awal per Indikator Kinerja Kegiatan..... 6
Tabel I. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ Tahun 2023..... 6
Tabel I. 5 Revisi I Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan..... 7

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ 8
Tabel II. 2 Data Pengguna Angkutan Umum..... 9
Tabel II. 3 Rekapitulasi Kecepatan Rata-rata Angkutan Barang 10
Tabel II. 4 Data Perjalanan Angkutan Umum yang Tepat Waktu 11
Tabel II. 5 Data Jumlah Kendaraan Umum yang Laik Jalan 13
Tabel II. 6 Capaian Anggaran berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2023..... 15

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiflkasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan disusun sebagai penjabaran pencapaian target Kinerja Kementerian dan unit kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja tiap triwulan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ Triwulan I Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPTJ sangat didukung oleh kinerja unit kerja Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Direktorat Angkutan BPTJ.

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target IKK yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai oleh Direktorat Angkutan BPTJ yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Angkutan BPTJ pada periode berikutnya.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Angkutan merupakan unit kerja penunjang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi

dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Orang, Angkutan Barang, dan Pendanaan dan Pengawasan Angkutan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pelaksanaan tugas Direktorat Angkutan BPTJ dalam rangka memenuhi fungsinya yaitu:

a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

   Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Struktur Organisasi Direktorat Angkutan terdiri dari Subdirektorat Angkutan Orang, Subdirektorat Angkutan Barang, Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan, dan Subbagian Tata Usaha.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT ANGKUTAN

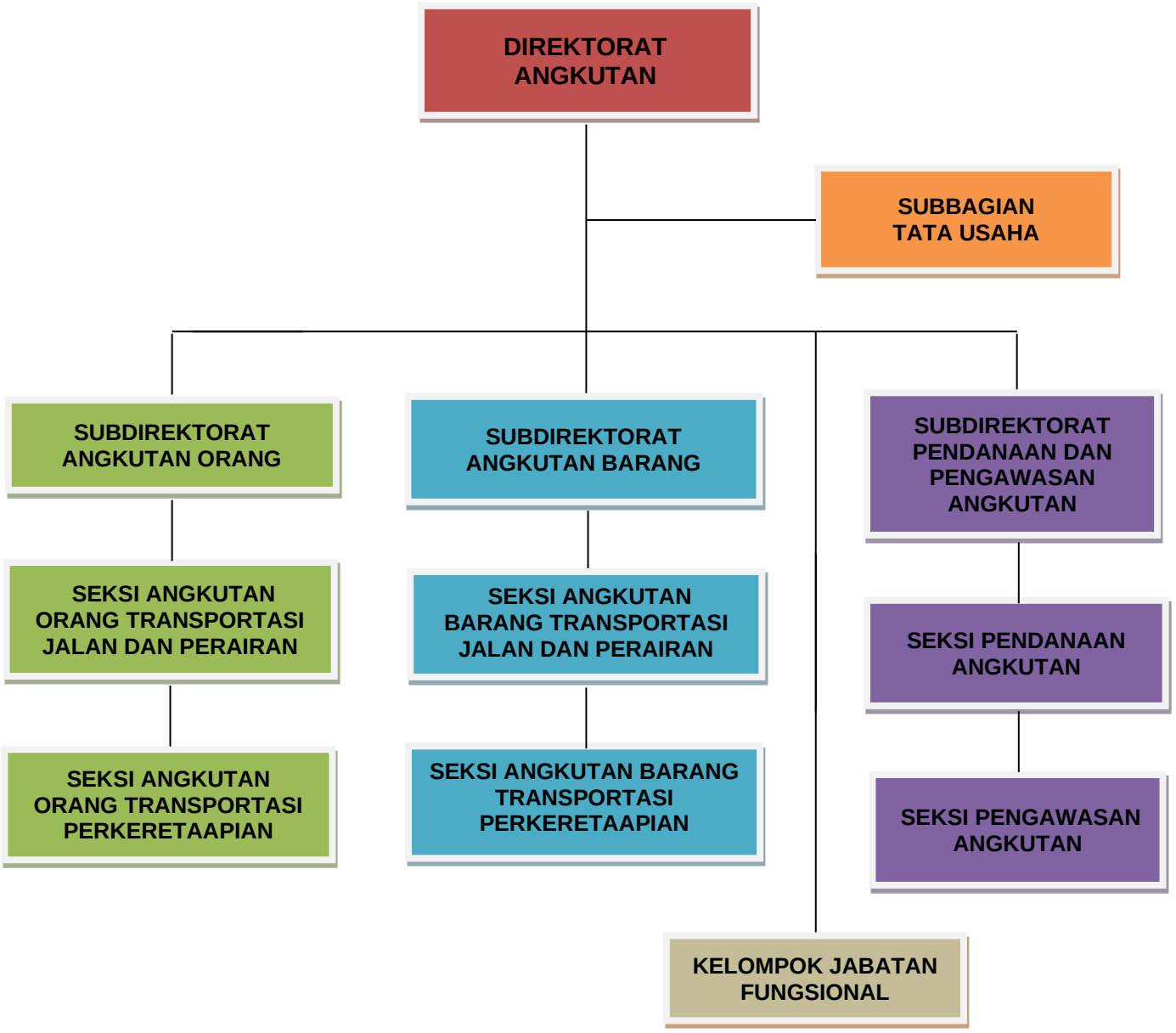

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Direktorat Angkutan

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

I.3. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), mendefinisikan Perjanjian Kinerja sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024 dan dokumen DIPA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2023 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2023. Diharapkan Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Berikut ini merupakan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun oleh Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel I. 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Km/jam	35,3

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	75

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Angkutan didukung dengan anggaran yang ditetapkan melalui DIPA T.A 2023.

Pagu alokasi Direktorat Angkutan untuk tahun anggaran 2022 yaitu sebesar **Rp56.164.088.000** (*Lima puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah*). Detail kegiatan dan alokasi anggaran awal ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Kegiatan dan Alokasi Anggaran Awal Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Angkutan Orang	Rp400.000.000
2	Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek	Rp48.764.088.000
3	NSPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp1.725.000.000
4	Laporan Monitoring Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp650.000.000
5	Laporan Monitoring Angkutan Barang di Jabodetabek	Rp1.350.000.000
6	Laporan Monitoring Sarana Transportasi di Jabodetabek	Rp2.100.000.000
7	Sosialisasi Teknis Bidang Angkutan Umum	Rp675.000.000

8	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Angkutan Transportasi Jabodetabek	Rp500.000.000

Alokasi tersebut selanjutnya dipetakan menjadi anggaran per indikator kinerja kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel I. 3 Alokasi Anggaran Awal per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)		(3)		(4)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	Rp49.164.088.000
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Rp1.850.000.000
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	Rp2.750.000.000
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	Rp2.400.000.000

Perubahan Pertama

Perubahan pertama atas Perjanjian Kinerja Direktur Angkutan Tahun 2023 disahkan pada bulan Maret 2023. Revisi pertama ini dilakukan atas dasar adanya pergantian Kepala BPTJ dan revisi 3 DIPA T.A 2023 dengan total pagu anggaran sebesar **Rp55.564.088.000** (*Lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh empat ribu delapan puluh delapan ribu rupiah*)

Tabel I. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Km/jam	35,3
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	75

Adapun anggaran masing-masing indikator kinerja kegiatan setelah perubahan perjanjian kinerja pertama adalah sebagai berikut:

Tabel I. 5 Revisi I Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)		(3)		(4)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	Rp49.164.088.000
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Rp1.900.000.000
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	Rp1.532.000.000
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	Rp2.968.000.000

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

II.1. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengetahui realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Angkutan BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Angkutan Tahun 2023 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Angkutan, berikut merupakan capaian kinerja Direktorat Angkutan pada Triwulan I Tahun 2023.

Tabel II. 1 Capaian Kinerja Direktorat Angkutan BPTJ
Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Capaian
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK5** Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40	62,41	156,03%
	IKK7 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	Km/Jam	33	34,89	105,73%
SK3 Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK8** Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	77	86,31	112,09%
SK5 Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	**IKK11** Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	69	47,13	68,30%

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek"

1. **IKK5 Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ**

   Analisis Capaian Kinerja

   Layanan Transportasi Jabodetabek yang dikembangkan dengan Program BPTJ terdiri dari angkutan umum *Jabodetabek Residence Connexion* (JRC), *Jabodetabek* Airport *Connexion* (JAC), dan Transjabodetabek serta Bus Biskita Trans Pakuan/*Buy The Service* (BTS) Kota Bogor. Peningkatan pengguna angkutan umum pada trayek yang dikembangkan dengan program-program BPTJ diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK5} = \frac{\text{Jumlah pengguna angkutan umum di trayek pengembangan BPTJ}}{\text{Kapasitas angkutan umum di trayek pengembangan BPTJ}} \text{ x } 100\%$$

   Data jumlah angkutan umum pada bulan Januari s.d Maret Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 2 Data Pengguna Angkutan Umum
di Wilayah Jabodetabek

No	Pelayanan	Bulan	Jumlah Penumpang (orang)	Kapasitas (orang)	Persentase (%)
1	*Jabodetabek Residence Connexion* (JRC)	Januari	202.528	280.667	72,16%
		Februari	192.959	271.134	71,17%
		Maret	220.254	301.134	73,14%
2	*Jabodetabek Airport Connexion* (JAC)	Januari	170.142	807.334	21,07%
		Februari	155.690	758.597	20,52%
		Maret	165.690	802.511	20,65%
3	Transjabodetabek	Januari	239.321	289.134	82,77%
		Februari	248.413	304.314	81,63%
		Maret	248.023	298.314	83,14%
4	Bus Biskita Trans Pakuan (BTS)	Januari	569.911	510.198	111,70%
		Februari	525.548	460.629	114,09%
		Maret	552.933	510.744	108,26%
Jumlah			**3.491.412**	**5.594.710**	**62,41%**

Sumber: Perusahaan Otobus dan Web Operasional BTS

$$\text{IKK5} = \frac{3.491.412}{5.594.710} \text{ x } 100\% = 62{,}41\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ adalah sebesar **62,41%**. Hasil capaian dari IKK5 mencapai persentase **156,03%** dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 40%.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian IKK5 maka Direktorat Angkutan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar angkutan umum terus memiliki peminat yang tinggi juga hal tersebut tentunya dapat meminimalisir masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sehingga tingkat kemacetan di wilayah Jabodetabek dapat berkurang.

2. IKK7 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek

Analisis Capaian Kinerja

Perhitungan kecepatan rata-rata kendaraan barang di jalan tol Jabodetabek bersumber dari jalan Tol Japek (Jakarta-Cikampek), Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), dan Tol Janger (Jakarta-Tangerang) yang meliputi jenis kendaraan barang golongan IV dan V. Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK7} = \frac{\Sigma\text{Rata} - \text{rata kecepatan angkutan barang di jalan tol Jabodetabek}}{\text{Jumlah jalan tol Jabodetabek}}$$

Data kecepatan rata-rata angkutan barang di jalan tol Jabodetabek pada bulan Januari s.d Maret 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II. 3 Rekapitulasi Kecepatan Rata-rata Angkutan Barang di Jalan Tol Jabodetabek

No	Periode	Kecepatan Rata-rata (Km/Jam)			Rata-rata Perbulan (Km/Jam)	Rata-rata Triwulan I (Km/Jam)
		Tol Japek	Tol Jagorawi	Tol Janger		
1	Januari	36,63	40,70	32,55	36,63	34,89
2	Februari	33,24	37,60	31,56	34,13	
3	Maret	32,70	37,98	31,01	33,90	

Sumber: Data Primer diolah, 2023

$$\text{IKK7} = \frac{36{,}63 + 34{,}13 + 33{,}90}{3}$$

$$= 34{,}89 \text{ km/jam}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek adalah sebesar **34,89 km/jam**. Hasil capaian dari IKK5 mencapai persentase **105,73%** dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 33 km/jam.

Permasalahan

- Terlalu banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan kendaraan barang di jalan tol, seperti isi muatan, kondisi kendaraan, situasi lalu lintas, perbaikan

jalan tol, kompetensi dan kondisi pengemudi, dll dan

- Banyak *stakeholder* lain yang terlibat dalam mengoptimalkan kendaraan barang di Jalan Tol.

Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi yang lebih intens dengan berbagai *stakeholder* lain terkait.
- Menjalin koordinasi dengan *stakeholder* lain terkait kelancaran kendaraan barang di Jalan Tol.
- Mencari metode perhitungan yang optimal dalam menghitung Kecepatan Kendaraan barang di Jalan Tol

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek"

Ketepatan waktu pelayanan transportasi menunjukkan rasio antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan rekapitulasi atas waktu kedatangan dan keberangkatan bus di Wilayah Jabodetabek.

IKK8 Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu

Analisis Capaian Kinerja

Perjalanan angkutan umum yang tepat waktu berasal dari jenis angkutan umum JRC, JAC, dan Transjabodetabek. Penghitungan perjalanan angkutan umum yang tepat waktu dilaksanakan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melalui Direktorat Angkutan yang mana data perjalanan diperoleh dari perusahaan otobus sebagai operator bus.

Berikut ini merupakan data perjalanan angkutan umum dari Terminal yang Tepat waktu pada bulan Januari s.d Maret 2023.

Tabel II. 4 Data Perjalanan Angkutan Umum yang Tepat Waktu

Jenis Pelayanan	Perjalanan Tepat Waktu	Jumlah Perjalanan
Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	4.766	4.202
Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	986	894
Transjabodetabek	1.224	925
Total	**6.976**	**6.021**

Sumber: Data Primer, 2023

$$\text{IKK8} = \left(\frac{\Sigma\text{Perjalanan AU dari terminal Tipe A yang tepat waktu}}{\Sigma\text{Perjalanan AU dari terminal Tipe A}}\right) \text{x } 100\%$$

$$\text{IKK8} = \left(\frac{6.021}{6.976}\right) \text{x } 100\%$$

$$= 86{,}31\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, nilai Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu adalah sebesar **86,31%**. Hasil capaian dari IKK8 mencapai persentase **112,09%** dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 77%.

Permasalahan

Pada Triwulan I terdapat kendala yang ditemukan pada IKK8 yaitu masih sulitnya koordinasi untuk meminta data kepada perusahaan otobus terkait penyediaan jadwal keberangkatan dan kedatangan bus serta format laporan jadwal dari operator juga beberapa tidak sesuai dengan contoh yang telah diberikan.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan serta mempertahankan kinerja IKK8 pada triwulan berikutnya, Direktorat Angkutan akan terus melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi secara intens terhadap perusahaan otobus sebagai operator penyedia data jadwal perjalanan baik keberangkatan maupun kedatangan bus agar lebih meningkatkan kedisiplinan pemenuhan jadwal.

Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman"

Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman diwujudkan dengan persentase kendaraan umum yang laik jalan. Persentase ini membandingkan jumlah kendaraan angkutan umum yang laik jalan dengan jumlah kendaraan yang dilakukan inspeksi oleh BPTJ.

IKK11 Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan

Analisis Capaian Kinerja

Kendaraan angkutan umum yang di *rampcheck* berasal dari jenis kendaraan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Kegiatan *rampcheck* tersebut dilakukan pada bus yang akan beroperasi di terminal dan pool bus pariwisata di Wilayah Jabodetabek. Berikut ini merupakan formula untuk menghitung Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan.

$$\text{IKK11} = \frac{\sum \text{Angkutan Umum yang Layak Jalan}}{\sum \text{Angkutan Umum yang di Ramp Check oleh BPTJ}} \text{ x } 100\%$$

Data rekapitulasi jumlah unit kendaraan yang dilakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (*rampcheck*) oleh BPTJ dan Dinas Perhubungan se-Jabodetabek di 9 (sembilan) terminal dan pool bus pariwisata di Wilayah Jabodetabek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 5 Data Jumlah Kendaraan Umum yang Laik Jalan

Tempat	Jumlah unit/ kendaraan	Laik Jalan	Tidak Laik Jalan
Terminal Pulogebang	124	46	78
Terminal Kampung Rambutan	178	153	25
Terminal Tanjung Priok	108	33	75
Terminal Kalideres	86	8	78
Terminal Jatijajar	168	78	90
Terminal Baranangsiang	190	20	170
Terminal Poris Plawad	150	113	37
Terminal Pondok Cabe	109	32	77
Terminal Kota Bekasi	114	33	81
Pool Bus Pariwisata	481	289	192
Jumlah	**1.708**	**805**	**903**

Sumber: Data primer diolah, 2023

$$\text{IKK11} = \frac{805}{1.708} \text{ x } 100\%$$

$$= 47{,}13\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, nilai Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan adalah sebesar **47,13%**. Hasil capaian dari IKK11 mencapai persentase **68,30%** dari target Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 69%.

Permasalahan

Pada Triwulan 1 ditemukan beberapa kendala atau penyebab yang mengakibatkan capaian IKK11 masih belum mencapai target Triwulan 1 diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah kendaraan yang di *rampcheck* oleh BPTJ sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.504/1/3/DJPD/2023 adalah

1.960 kendaraan, namun masih dalam hal ini masih terdapat selisih 252 kendaraan yang disebabkan beberapa hal diantaranya

- banyaknya perusahaan angkutan umum yang sudah menjual kendaraannya semasa pandemi Covid-19
- terdapat kendaraan Hi-Ace dan Elf di dalam data sedangkan rampcheck hanya dilakukan pada bus besar dan bus medium
- adanya kekeliruan data lokasi pool yang berada di luar Jabodetabek
- tidak tersedianya kendaraan di dalam pool disebabkan sedang dalam proses sewa dalam jangka waktu yang panjang

2. Masih banyaknya jumlah kendaraan bus yang tidak laik jalan disebabkan belum terpenuhinya unsur administrasi dan unsur teknis sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor : SK.5637/AJ.403/DRJD/2017.

Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Direktorat Angkutan sebagai upaya tercapainya target pada triwulan berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pengarahan terkait kelengkapan unsur administrasi dan unsur teknis yang wajib ada dan dilaksanakan oleh pengurus perusahaan otobus dan pengemudi kendaraan

2. Pemenuhan target jumlah kendaraan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan memperhatikan dan meminimalisir beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target kendaraan yang di *rampcheck* oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/Direktorat Angkutan.

II.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Direktorat Angkutan BPTJ pada Tahun 2023 berdasarkan Revisi ke 3 DIPA adalah **Rp55.564.088.000** yang secara keseluruhan berasal dari Rupiah Murni (RM). Sampai dengan bulan Maret 2023 anggaran Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah terealisasi sebesar **Rp10.064.074.977** atau **18,11%** terhadap pagu total. Adapun capaian anggaran, pagu anggaran dan realisasi per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 6 Capaian Anggaran berdasarkan IKK Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi s.d Triwulan I	% Capaian
IKK5 Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	**Rp49.164.088.000**	**Rp8.813.964.008**	**18,69%**
IKK7 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	**Rp1.900.000.000**	**Rp521.931.763**	**27,47%**
IKK8 Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	**Rp1.532.000.000**	**Rp417.101.954**	**27,23%**
IKK11 Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	**Rp2.968.000.000**	**Rp311.077.252**	**10,48%**

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan Tabel II.6 di atas, pada Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Angkutan telah merealisasikan anggaran untuk mendukung kegiatan IKK5, IKK7, IKK8, dan IKK11. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. **IKK5** Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ **meliputi:**
   - Kegiatan Pengawasan Operasional dan Layanan *Buy The Service* (BTS) di Kota Bogor (3 s.d 31 Januari 2023)
   - Rapat Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Program BTS Kota Bogor (9 s.d 10 Februari 2023)
2. **IKK7** Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek **meliputi:**
   - Survei Inventarisasi Data Kecepatan Angkutan Barang di Jalan Tol di Wilayah Jabodetabek pada Gerbang Keluar Masuk Tol Cikarang Barat, Tol Cikarang Utara, Tol Cibatu, dan Tol Cibitung (17 s.d 20 Januari 2023)
   - Survei Inventarisasi Data Pergerakan AB di Jalan Tol di Gerbang Tol Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Cibatu (8-10 Februari 2023)
   - Survei Inventarisasi Data Pergerakan AB di Jalan Tol di Gerbang Tol Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Cibatu (23 s.d 25 Februari 2023)
   - Monitoring Pergerakan Kendaraan AB di Jalan Tol Jakarta-Tangerang di

Gerbang Tol Bitung, Tangerang, Karawaci, Kunciran (2 s.d 3 Februari 2023)

- Survei Pergerakan Kendaraan AB di Jalan Tol Jakarta-Tangerang di Gerbang Tol Bitung, Tangerang, Karawaci, Kunciran (8 s.d 10 Maret 2023)
- Rapat Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Dimensi Besar di Kota Bekasi (26 Januari 2023)
- Monitoring Persiapan Perubahan Waktu Operasional AB di Jalan Tol Jakarta-Tangerang di Simpang Susun Kunciran, Rest Area 13a Tol Jakarta Tangerang, Simpang Susun Karang Tengah, Rest Area 13b Tol Jakarta-Tangerang (6 s.d 7 Februari 2023)
- Survei Sarana dan Prasarana Penunjang Okupansi Stasiun Barang di Stasiun Nambo dan Stasiun Lembah Abang (19 s.d 20 Januari 2023 dan 24 s.d 25 Januari 2023)
- Survei Inventarisasi SOP Penanganan Muatan Barang Beracun dan Berbahaya (B3) serta Limbah B3 pada Kereta Barang di St. Nambo (1 s.d 2 Februari 2023)
- Survei Inventarisasi Potensi Cargo Hitching AB pada Kereta KRL Jabodetabek di Kantor PT. KCI (6 s.d 7 Februari 2023)
- Survei Inventarisasi Potensi Komoditas Cargo Hitching AB Kereta Api di Kantor KCI, PT. KALogistik (16 s.d 17 Februari 2023)
- Survei Pendahuluan Inventarisasi Potensi Permintaan Cargo Hitching AB Kereta Api di St. Pasar Senen, St. Jatinegara, St. Tanah Abang, St. Jakarta Kota, St. Duri, dan St. Manggarai (16 s.d 17 Maret 2023)
- Survei Inventarisasi SOP Pengangkutan berdasarkan Komoditas pada Kereta Barang di St. Pasar Senen, St. Jatinegara, St. Bekasi, St. Nambo, St. Jakarta Gudang, St. Jakarta Kota, St. Pasoso, dan St. Sungai Lagoa (7 s.d 10 Maret 2023)
- Konsinyering Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Capaian Kinerja Direktorat Angkutan Tahun 2022 (23 s.d 25 Februari 2023)

3. **IKK8** Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu **meliputi:**
   - Rapat Persiapan Penghargaan Masinis, Pramudi Teladan, dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek (9 Maret 2023)
   - Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan PT. Kramatdjati Asri Sejati (5 s.d 6 Januari 2023)
   - Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan

Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) Koperasi Wahana Kalpika (KWK) (9 s.d 10 Januari 2023)

- Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) PT. Anugerah Mas (24 s.d 25 Januari 2023)
- Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) PT. Wahana Bina Karya Mandiri (26 s.d 28 Januari 2023)
- Survei Inventarisasi Halte dengan Trayek Angkutan Transjabodetabek sesuai rencana Instalasi Peralatan BIMS di Wilayah Jabodetabek (17 s.d 18 Februari 2023)
- Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) Koperasi Jasa Anugerah dan Koperasi Jasa Mandiri Jaya di Kota Depok (15 s.d 16 Februari 2023)
- Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) PT. Bayu Holong Persada di DKI Jakarta (17 s.d 18 Februari 2023)
- Survei SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan Jabodetabek Reguler (Transjabodetabek) PT. Royal Wisata Nusantara di Kota Tangerang (21 s.d 23 Februari 2023)
- Survei Pengecekan SPM AO Dalam Trayek Pelayanan Angkutan Perkotaan JAC di Kota Bandung (24 Februari 2023)
- Rapat Pembahasan Rencana Kenaikan Tarif KRL (10 Januari 2023)
- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Perkeretaapian Jabodetabek (11 s.d 12 Januari 2023)
- Rapat Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama antara BPTJ dengan Dishub Prov. DKI Jakarta, PT. KCI, dan Perum PPD tentang Penyediaan Data dan Informasi Perjalanan Penumpang Angkutan Massal di Wilayah Jabodetabek (31 Januari 2023)
- Tinjauan Lapangan LRT (15 s.d 17 Februari 2023)
- Penyusunan dan Finalisasi Berita Acara Kesepakatan antara BPTJ dan PT. KCI tentang Pengakhiran Kesepakatan Bersama Penyediaan Data dan Informasi Kereta Rel Listrik dan Volume Penumpang setiap Stasiun di Wilayah Jabodetabek (2 s.d 4 Maret 2023)
- Tinjauan Lapangan LRT (7 Maret 2023)

4. **IKK11** Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan **meliputi:**
    - Kegiatan Persiapan Pelatihan Bimtek Tata Cara Pengereman AB Tahun 2023 di Hotel Bogor Valley (20 s.d 22 Februari 2023)

- Konsinyering Persiapan Bimtek Penanganan Muatan Barang Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah B3 pada Kereta Barang di Hotel The Heritage Bogor (2 s.d 3 Maret 2023)
- Kegiatan Persiapan Sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada Perusahaan Angkutan Umum/Barang di Wilayah Jabodetabek Tahun 2023 (14 s.d 16 Februari 2023) di Hotel Bogor Valley
- Kegiatan Monitoring SMK PT. Mayasari Bakti, PT. Anugerah Mas, PT. Duta Lintas, Perum PPD (27 Februari s.d 1 Maret 2023)
- Rapat Pengecekan dan Penilaian Dokumen SMK Perusahaan AB di Hotel Valley Bogor (13 s.d 15 Maret 2023)
- Rapat Pembahasan Analisa dan Evaluasi Posko Angkutan Nataru 2022 serta Persiapan Angleb Idul Fitri 2023 di Hotel Amaroossa Grande Bekasi (23 s.d 24 Februari 2023)
- Kegiatan Inspeksi Keselamatan LLAJ (*rampcheck*) pada Pool Bus Pariwisata di Wilayah Jabodetabek (2 s.d 27 Maret 2023)
- Kegiatan Inspeksi Keselamatan LLAJ (*rampcheck*) pada Terminal di Wilayah Jabodetabek (23 s.d 31 Maret 2023 dan 3 s.d 6 April 2023)
- Piket Posko Penyelenggaraan Angkutan pada Masa Idul Fitri Tahun 2023/1444 H di Wilayah Jabodetabek (14 April s.d 2 Mei 2023)

BAB III PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Angkutan yang masing-masing telah dihitung capaian pelaksanaannya.
2. Pada Triwulan I Tahun 2023, rincian capaian pelaksanaan dari masing-masing IKK adalah sebagai berikut:
   a. **IKK5** tercapai sebesar **62,41%** dengan target Triwulan I yaitu 40%;
   b. **IKK7** tercapai **34,89 km/jam** dengan target Triwulan I yaitu 33 km/jam;
   c. **IKK8** sebesar **86,31%** dengan target Triwulan I yaitu 77%;
   d. **IKK11** sebesar **47,13%** dengan target Triwulan I yaitu 69%.
3. Realisasi anggaran Direktorat Angkutan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 telah terserap sebesar **18,11%**

III.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi pada Triwulan I Tahun 2023, terdapat beberapa saran dan tindak lanjut yang diberikan agar capaian kinerja Direktorat Angkutan dapat lebih baik lagi di periode berikutnya sebagai berikut:

1. Direktorat Angkutan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menyiapkan alternatif rencana pelaksanaan pada program-program kerja di triwulan berikutnya.
2. Untuk mengurangi jumlah kendaraan barang di jalan tol maka Direktorat Angkutan akan terus berupaya untuk mengalihkan pengangkutan barang menggunakan kereta api.
3. Direktorat Angkutan akan melakukan kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal Tipe A wilayah Jabodetabek secara rutin dan berkesinambungan untuk meminimalisir jumlah kendaraan umum yang tidak laik jalan.

L A M P I R A N

Lampiran I Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATAN RUSTANDI, M.Sc.

Jabatan : Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.	TATAN RUSTANDI, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Km/jam	35,3
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	75

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Layanan Angkutan Orang	Rp.	400.000.000
2.	Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) Jabodetabek	Rp.	48.764.088.000
3.	NSPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp.	1.725.000.000
4.	Laporan Monitoring Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp.	650.000.000
5.	Laporan Monitoring Angkutan Barang di Jabodetabek	Rp.	1.350.000.000
6.	Laporan Monitoring Sarana Transportasi di Jabodetabek	Rp.	2.100.000.000
7.	Sosialisasi Teknis Bidang Angkutan Umum	Rp.	675.000.000
8.	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Angkutan Transportasi Jabodetabek	Rp.	500.000.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala	**Direktur Angkutan**
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**
Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H	**TATAN RUSTANDI, M.Sc.**

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT ANGKUTAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/PROYEK	TARGET												ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	**SK2** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK5** Persentase Peningkatan Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40	Layanan Angkutan Orang dan Subsidi Angkutan Penumpang (*Buy The Service*) Jabodetabek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49.164.088.000	Subdit Angkutan Orang dan Subdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan
		IKK 7 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Tol Jabodetabek	Km/Jam	35,3	Sosialisasi Teknis Bidang Angkutan Umum dan Laporan Monitoring Angkutan Barang di Jabodetabek	33	34	34	34	35	35	35	35	35	35,3	35,3	35,3	1.850.000.000	Subdit Angkutan Barang dan Subbagian Tata Usaha
2	**SK3** Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK8** Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80	Laporan Monitoring Angkutan Penumpang di Jabodetabek dan Laporan Monitoring Sarana Transportasi di Jabodetabek	77	77	77	78	78	78	79	79	79	80	80	80	2.750.000.000	Subdit Angkutan Orang dan Subdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan
3	**SK5** Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman dan Nyaman	**IKK11** Persentase Kendaraan Umum yang Layak Jalan	%	75	NSPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek	66	66	66	69	69	69	72	72	72	75	75	75	2.400.000.000	Subdit Angkutan Barang dan Subdit Pendanaan dan Pengawasan Angkutan

Jakarta, Januari 2023
DIREKTUR ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

TATAN RUSTANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19[illegible]

Lampiran II Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATAN RUSTANDI, M.Sc.

Jabatan : Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si.	**TATAN RUSTANDI, M.Sc.**

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK5	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40
			IKK7	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	Km/jam	35,3
2	SK3	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK8	Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80
3	SK5	Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman, dan Nyaman	IKK11	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	75

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Layanan Angkutan Orang	Rp.	400.000.000
2.	Subsidi Angkutan Penumpang (*Buy The Service*) Jabodetabek	Rp.	48.764.088.000
3.	NSPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp.	1.725.000.000
4.	Laporan Monitoring Angkutan Penumpang di Jabodetabek	Rp.	650.000.000
5.	Laporan Monitoring Angkutan Barang di Jabodetabek	Rp.	1.200.000.000
6.	Laporan Monitoring Sarana Transportasi di Jabodetabek	Rp.	1.450.000.000
7.	Sosialisasi Teknis Bidang Angkutan Umum	Rp.	675.000.000
8.	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Angkutan Transportasi Jabodetabek	Rp.	700.000.000
Total Pagu Direktorat Angkutan T.A 2023		**Rp.**	**55.564.088.000**

Catatan: Terdapat Rp600.000.000 (1,07%) yang terdampak *Automatic Adjustment*

Jakarta, Maret 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plt. Kepala	**Direktur Angkutan**
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	**Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**
Dr. ROBBY KURNIAWAN, S.STP., M.Si.	**TATAN RUSTANDI, M.Sc.**

RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT ANGKUTAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Output	Rencana Pelaksanaan*												Anggaran	Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	**SK2** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK5** Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum pada Trayek yang Dikembangkan dengan Program-program BPTJ	%	40		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47.164.088.000	Subdirektorat Angkutan Orang dan Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan
			Layanan	1	Pengadaan Peralatan Penunjang Perizinan Angkutan Umum	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	
			Layanan	1	Pengadaan Peralatan Survei Angkutan Umum	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	
			Layanan	1	Program Pemberian Subsidi Angkutan Umum Dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) Di Wilayah Kota Bogor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43.836.243.000	
			Layanan	1	Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan Dengan Skema *Buy The Service* Di Wilayah Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.925.845.000	
		IKK7 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Barang di Jalan Toll Jabodetabek	**Km/jam**	**35,3**		33	33	33	33	34	34	34	34	35,3	35,3	35,3	35,3	1.900.000.000	Subdirektorat Angkutan Barang dan Subbagian Tata Usaha
			Laporan	1	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Logistik Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	600.000.000	
			Laporan	1	Pendataan, Evaluasi Penerapan, dan Penataan Standar Pelayanan Minimal Terminal, Stasiun, dan Angkutan Barang di Wilayah Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	600.000.000	
			Kegiatan	1	Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Angkutan Penumpang dan Barang Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	700.000.000	
2	**SK3** Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK8** Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu	%	80		77	77	77	78	78	78	79	79	79	80	80	80	1.832.000.000	Subdirektorat Angkutan Orang dan Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan
			Laporan	1	Penyediaan Platform dan Peralatan Pendukung Untuk Pengawasan Manajemen Operasional Subsidi Angkutan Umum Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200.000.000	
			Laporan	1	Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Wilayah Jabodetabek	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	682.000.000	
			Laporan	1	Penghargaan Pramudi, Masinis Teladan dan Operator Angkutan Umum Terbaik di Wilayah Jabodetabek	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	400.000.000	
			Laporan	1	Pengecekan Penerapan Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	150.000.000	
			Laporan	1	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum Transportasi Perkeretaapian Jabodetabek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.000.000	
3	**SK5** Terselenggaranya Sarana Transportasi Jabodetabek yang Selamat, Aman dan Nyaman	**IKK11** Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Jalan	%	75		-	-	69	-	-	72	-	-	73	-	-	75	2.968.000.000	Subdirektorat Angkutan Barang dan Subdirektorat Pendanaan dan Pengawasan Angkutan
			Orang	60	Bimbingan Teknis Peningkatan Keselamatan Angkutan Barang	-	-	-	-	60	60	60	60	-	-	-	-	675.000.000	
			Pedoman	1	Sosialisasi Penerapan SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) di Perusahaan Angkutan Barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	225.000.000	
			Pedoman	1	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1.500.000.000	
			Laporan	1	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Sarana Angkutan Di Wilayah Jabodetabek	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	500.000.000	
			Laporan	1	Pengawasan Dimensi Dan Muatan Kendaraan Angkutan Barang	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	68.000.000	

*) Sampai dengan bulan n

Jakarta, Maret 2023

DIREKTUR ANGKUTAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

TATAN RUSTAMSI, M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660223 198903 1 002

Lampiran III Data Jumlah Penumpang JRC, JAC, Transjabodetabek dan BTS periode Januari s.d Maret Tahun 2023

Pelayanan	Januari		
	Kapasitas	Penumpang	Presentase
JRC	280.667	202.528	72%
JAC	807.334	170.142	21%
Transjabodetabek	289.134	239.321	83%

Pelayanan	Februari		
	Kapasitas	Penumpang	Presentase
JRC	271.134	192.959	71%
JAC	758.597	155.690	21%
Transjabodetabek	304.314	248.413	82%

Pelayanan	Maret		
	Kapasitas	Penumpang	Presentase
JRC	301.134	220.254	73%
JAC	802.511	165.690	21%
Transjabodetabek	298.314	248.023	83%

Report Rute BISKITA BOGOR - 1 January 2023 to 31 January 2023

Kode Rute	Rute	Total Operasi	Total Penumpang	Total Ritase	Kapasitas Terpasang	AVG Ritase	KM Tempuh Koridor	KM Total Layanan	KM Sanksi	KM Prestasi	Rupiah Prestasi	Load Factor
1F	Terminal Bubulak - Cidangiang	385	157.437	3333	129.987	8,7	93.757,29	96.570,01	10,00	96.560,01	1.248.231.232,46	121.12 %
2F	Terminal Bubulak via Cidangiang - Ciawi	444	212.864	3027	118.053	6,8	104.885,55	108.032,12	10,00	108.022,12	1.396.401.900,00	180.31 %
5F	Terminal Ciparigi - Stasiun KA Bogor 1	315	136.059	3392	132.288	10,8	69.536,00	71.622,08	10,00	71.612,08	925.729.358,16	102.85 %
6F	Parung Banteng - Air Mancur 1 (GOR 2)	283	63.551	3330	129.870	11,8	63.603,00	65.511,09	10,00	65.501,09	846.732.590,43	48.93 %

Report Rute BISKITA BOGOR - 1 February 2023 to 28 February 2023

Kode Rute	Rute	Total Operasi	Total Penumpang	Total Ritase	Kapasitas Terpasang	AVG Ritase	KM Tempuh Koridor	KM Total Layanan	KM Sanksi	KM Prestasi	Rupiah Prestasi	Load Factor
1F	Terminal Bubulak - Cidangiang	341	152.082	3011	117.429	8,8	84.699,43	87.240,41	40,00	87.200,41	1.127.239.737,56	129.51 %
2F	Terminal Bubulak via Cidangiang - Ciawi	401	191.723	2729	106.431	6,8	94.559,85	97.396,65	55,00	97.341,65	1.258.335.451,38	180.14 %
5F	Terminal Ciparigi - Stasiun KA Bogor 1	283	123.040	3065	119.535	10,8	62.832,50	64.717,47	5,00	64.712,47	836.538.164,32	102.93 %
6F	Parung Banteng - Air Mancur 1 (GOR 2)	256	58.703	3006	117.234	11,7	57.414,60	59.137,04	10,00	59.127,04	764.335.220,23	50.07 %

Report Rute BISKITA BOGOR - 1 March 2023 to 31 March 2023

Kode Rute	Rute	Total Operasi	Total Penumpang	Total Ritase	Kapasitas Terpasang	AVG Ritase	KM Tempuh Koridor	KM Total Layanan	KM Sanksi	KM Prestasi	Rupiah Prestasi	Load Factor
1F	Terminal Bubulak - Cidangiang	383	156.375	3303	128.817	8,6	92.913,39	95.700,79	70,00	95.630,79	1.236.219.244,31	121.39 %
2F	Terminal Bubulak via Cidangiang - Ciawi	436	216.835	3019	117.741	6,9	104.608,35	107.746,60	45,00	107.701,60	1.392.258.589,66	184.16 %
5F	Terminal Ciparigi - Stasiun KA Bogor 1	314	121.068	3367	131.313	10,7	69.023,50	71.094,20	48,00	71.046,20	918.414.292,03	92.20 %
6F	Parung Banteng - Air Mancur 1 (GOR 2)	282	58.655	3407	132.873	12,1	65.073,70	67.025,91	28,00	66.997,91	866.081.995,50	44.14 %

Lampiran IV *Sampling* Data *Tapping* Kartu Elektronik pada pintu Gerbang Tol Cikarang Barat

NoKartu	Gol	Dari Gerbang Tol	Ke Gerbang Tol	Jarak Tempu	Waktu Tempu	Kecepatan kendaraan
6032982813049291	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,54	39,26
6032981047805023	V	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,55	39,78
6032984099608261	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,63	33,52
6032982825291204	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,69	30,69
6032981044190114	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,62	34,44
6032982601062852	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,53	40,11
6032982809538174	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,61	35,97
6032984094758152	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,57	37,14
6032984072791605	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,95
6032982800189290	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,66	32,34
145007200925155	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,67	31,65
6032982818851840	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,62	33,92
6032982813255112	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,70	30,18
6032982804650214	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,76	28,86
6032986086176780	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,74	28,55
6032984094756255	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,70	30,12
6032986061745559	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,58	36,73
6032981048966659	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,69
6032986081708678	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,66	32,11
6032982509446520	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,64	33,04
6032982814628374	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,75	28,40
6032982823871270	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,73	29,20
145008200475399	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,68	31,11
145008200300092	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,69	30,90
145008200300092	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,69	30,90
145008200475266	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,67	31,69
145008200475266	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,67	31,69
145008200304573	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,53	40,08
145008200304573	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,53	40,08
145008200475225	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,49
145008200475225	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,49
145008200300118	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,49	43,09
145008200300118	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,49	43,09
145200302350832	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,53	41,05
6032986098668410	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,65	33,34
145008200475407	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,54	38,90
145200002152520	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,63	33,71
6032986098368201	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,59	35,71
6032982812532040	V	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,65	33,68
6032986062747679	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,52	41,05
6032984059046239	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,52	41,83
6032982818178426	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,57	37,12
6032982803136454	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,71	29,96
6032986062525364	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,56	37,89
6032984039875129	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,56	37,93
6032986041465856	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,52	40,60
6032984052859141	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,73	28,96
6032982702474436	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,65	32,38
145008200227667	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,47	44,79
145008200304540	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,45	46,65
6032982701349936	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,62	33,97
6032984092782014	V	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,53	41,39
6032982812533279	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,73	30,01
6032981033160706	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,43	49,33
6032982804597258	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,59	36,12
6032984038179929	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,49	43,12
6032984036629032	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,68	31,21
6032986095505169	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,62	34,88
6032982823067085	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,61	35,74
6032984076876758	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,58	36,38
6032983201072861	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,59	35,76
6032982811675402	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,67	31,85
6032982507208690	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,68	30,99
6032984094470204	V	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,60	36,47
6032984036628927	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,66	31,99
6032982827521301	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,64	33,00
6032982828998011	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,57	37,14
6032981049272610	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,70	30,92
145200022653440	V	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,74	29,35
6032982812597191	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,77	28,35
6032984060455494	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,73	29,79
6032982812311395	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,76	28,07
6032984040771333	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,73	29,85
6032982506511466	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,70	31,06
6032986087348057	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,68	31,15
6032982811046299	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,66	32,09
6032982806897508	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,66	32,23
6032984094439936	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,65	32,78
6032982810151009	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,69	31,73
145008200406949	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,71	30,05
6032986087887252	IV	Cikarang Barat 4	Cikunir 2	21,8	0,66	33,25
6032986084505444	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,71	30,02
145008200304672	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,72	29,31
145008200227725	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,73	29,02
6032982814521009	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,63	33,80
145008200407038	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,60
145200013300381	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,60
145008200475472	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,58	36,36
145008200227618	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,61	34,90
6032982506337839	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,55	38,31
6032982701343608	V	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,54	39,24
6032984094304825	IV	Cikarang Barat 5	Cikunir 2	21,2	0,56	37,60

Lampiran V *Sampling* Data Jadwal Perjalanan Keberangkatan dan Kedatangan Bus Perusahaan Perum PPD

No	Perusahaan	TNKB	Jenis Pelayan	Asal Tujuan Trayek/Pelayanan	Kapasita (seat)	Tanggal	Jwal Perjalanan (Renca		Jwal Perjalanan (Realisa		Rencana		Realisasi		eterisian Kurs	Ket
							Berangkat	Pulang	Berangkat	Pulang	Rit	Pnp	Rit	Pnp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	4	17	25%	
2	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	4	28	41%	
3	PERUM PPD	B7890TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	3	19	28%	
4	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	3	8	12%	
5	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	3	20	29%	
6	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	3	16	24%	
7	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	4	20	29%	
8	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	5	21	31%	
9	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	1 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	3	14	21%	
10	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	5	23	34%	
11	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	5	29	43%	
12	PERUM PPD	B7890TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	3	19	28%	
13	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	4	15	22%	
14	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	3	22	32%	
15	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	4	27	40%	
16	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	4	16	24%	
17	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	3	18	26%	
18	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	4	28	41%	
19	PERUM PPD	B7940TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	2 Jan 2023	14:00	00:00	14:00	00:00	4	95,2	2	12	18%	
20	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	3	17	25%	
21	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	4	25	37%	
22	PERUM PPD	B7890TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	4	30	44%	
23	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	3	13	19%	
24	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	4	27	40%	
25	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	3	23	34%	
26	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	3	12	18%	
27	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	3	19	28%	
28	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	4	28	41%	
29	PERUM PPD	B7940TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	3 Jan 2023	14:00	00:00	14:00	00:00	4	95,2	4	24	35%	
30	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	3	21	31%	
31	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	3	13	19%	
32	PERUM PPD	B7890TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	3	4	6%	
33	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	4	18	26%	
34	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	3	20	29%	
35	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	3	21	31%	
36	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	3	7	10%	
37	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	4	20	29%	
38	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	3	25	37%	
39	PERUM PPD	B7940TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	4 Jan 2023	14:00	00:00	14:00	00:00	4	95,2	4	27	40%	
40	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	4	23	34%	
41	PERUM PPD	B7929TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	3	15	22%	
42	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	3	21	31%	
43	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	4	20	29%	
44	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	4	26	38%	
45	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	4	21	31%	
46	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	3	6	9%	
47	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	4	25	37%	
48	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	4	12	18%	
49	PERUM PPD	B7940TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	5 Jan 2023	14:00	00:00	14:00	00:00	4	95,2	1,5	21	31%	
50	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	4	27	40%	
51	PERUM PPD	B7929TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	06:00	16:00	06:00	16:00	4	95,2	1	3	4%	
52	PERUM PPD	B7852TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	07:00	17:00	07:00	17:00	4	95,2	4	28	41%	
53	PERUM PPD	B7890TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	08:00	18:00	08:00	18:00	4	95,2	3	11	16%	
54	PERUM PPD	B7847TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	09:00	19:00	09:00	19:00	4	95,2	4	16	24%	
55	PERUM PPD	B7922TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	10:00	20:00	10:00	20:00	4	95,2	3	21	31%	
56	PERUM PPD	B7919TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	11:00	21:00	11:00	21:00	4	95,2	3	22	32%	
57	PERUM PPD	B7888TGB	JAC	Mall Taman Anggrek - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	12:00	22:00	12:00	22:00	4	95,2	3	14	21%	
58	PERUM PPD	B7843TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	13:00	23:00	13:00	23:00	4	95,2	3	22	32%	
59	PERUM PPD	B7923TGB	JAC	Mall Kelapa Gading - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	14:00	00:00	14:00	00:00	4	95,2	4	24	35%	
60	PERUM PPD	B7940TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	6 Jan 2023	05:00	15:00	05:00	15:00	4	95,2	4	38	56%	
61	PERUM PPD	B7924TGB	JAC	Intermark BSD - Bandara Soekarno Hatta	34	7 Jan 2023	06:00	16:00	05:00	15:00	4	95,2	2	6	9%	

Umum | Laporan | Cth_Umum | Cth_Laporan | Petunjuk Pengisian

Lampiran VI Rekap Jumlah Kendaraan yang di *rampcheck* pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2023

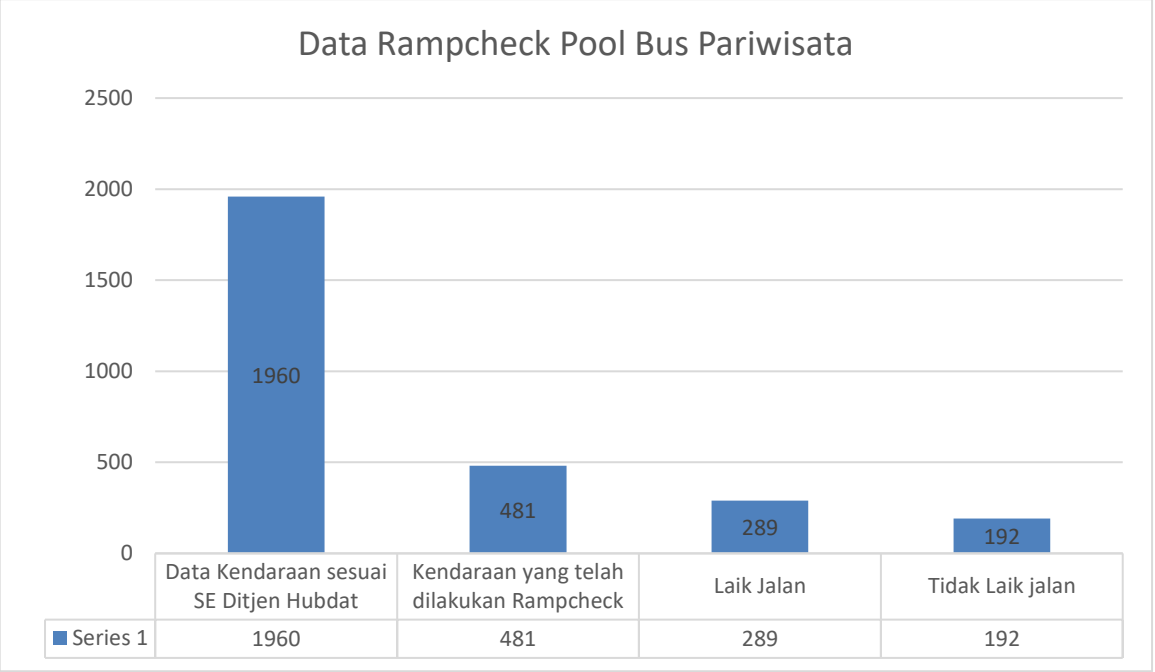

REKAPITULASI PELAKSANAAN INSPEKSI KESELAMATAN HARIAN
BIDANG PELAYANAN JABODETABEK

Periode: 28 Maret s.d 6 April 2023
Lokasi: JATIJAJAR

No.	Nama Perusahaan	No. TNKB	Hasil Inspeksi Keselamatan				Trayek	No. STUK	Jumlah	Item Pemeriksaan															Keterangan
			Laik Jalan		Tidak Laik Jalan					Administrasi			Teknis Utama									Teknis Penunjang				
			Diijinkan Operasional	Peringatan/Perbaikan	Dilarang Operasional	Tilang dan Dilarang Operasional				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Selasa, 28 Maret 2023																									
1	MGI	D 7817 AP	1				JAKARTA - BANDUNG	BD196307		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
2	GARUDA MAS	B 7217 UGA	1				LAMPUNG - KEDIRI	JKT1830678		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
3	GARUDA MAS	B 7281 UGA	1				BOGOE - CEPU	JKT220955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
4	MGI	D 7624 AO	1				BANDUNG - DEPOK	BD184124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
5	GUNUNG HARTA	N 7972 UA	1				TANGGERANG - MALANG	BF73B21000573		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
6	AGRA MAS	B 7299 IW			1		BOGOR - BOJONEGORO	JKT698486		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu Mundur Mati
7	DEWI SRI	G 1471 CE				1	JAKARTA - CEPU	TG12238		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu Mundur Mati, KP Tidak Ada
8	ANS	BA 7043 AU				1	PADANG - BANDUNG	AD13PD24112		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu Mundur Mati, KP Tidak Ada
9	SINAR JAYA	B 7365 IW		1			JAKARTA - SOLO	JKT699988		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Lampu Posisi
10	SETIA NEGARA	E 7583 YG				1	JAKARAT - CIREBON	JKT719989		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu rem dan lampu mundur mati, kaca depan retak, KP tidak berlaku
11	MAYORA SURYA	AG 7239 UL				1	-	KM8415		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tidak ada, lampu mundur mati
12	HARAPAN JAYA	AG 7484 US				1	JAKARTA - MALANG	TA11929B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KIR tidak ada
13	HARYANTO	B 7320 VGA			1		JAKARTA - SUMENEP	BB71B19105434		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
14	MURNI JAYA	A 7729 NL			1		JAKARTA - YOGYAKARTA	JKT661222		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
15	MEDALI MAS	N 7028 UB				1	BOGOR - MALANG	BF73B22001650		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tidak berlaku
16	HARYANTO	B 7114 VGA			1		JAKARTA - PONOROGO	TNG87743		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
17	MURNI JAYA	B7417 TGD			1		DEPOK - WONOSARI	JKT2013744		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
18	GUNUNG HARTA	B 7438 KGA			1		JAKARTA - PAMEKASAN	BKS190485		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
19	SINDORO SATRIA MAS	H 1405 G			1		BOGOR - PONOROGO	SM120468		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lampu rem mati, ban gundul
20	NPM	BA 7030 NU				1	PADANG - JAKARTA	AD74B22000057		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tidak berlaku, kaca depan retak
21	SINAR JAYA	B 7217 FGA	1				JAKARAT - WONOSOBO	BKS36137A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
22	SINAR JAYA	B 7935 ZX	1				BEKASI - CILACAP	JKT68751		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
23	HARYANTO	B 7207 VGA			1		TANGGERANG - SUMENEP	TNG98970		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu utama kanan mati, lampu mundur mati
24	BUDIMAN	Z 7612 HG			1		DEPOK - TASIKMALAYA	TSM22330A		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tidak berlaku, lampu dekat kana mati
25	LORENA	B 7766 SU			1		JAMBI - MALANG	JKT1442566		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati, ban belakang vulkanisir
26	HARYANTO	B 7277 VGA			1		TANGGERANG SELATAN - BLITAR	BB 71B18101949		0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati, ban belakang vulkanisir
27	LAJU PRIMA	B 7374 IZ			1		BUKIT TINGGI - BANDUNG	JKT768530		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
28	ROSALIA INDAH	AD 1456 CU	1				BOGOR - BLITAR	SLO 37740		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
29	HIBA PRIMA	B 7218 TGD			1		MERAK - CEPU	JKT1830687		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
JUMLAH			8	1	13	7			29	1	7	0	17	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	
Rabu, 29 Maret 2023																									
1	DOA IBU	Z 7872 HB				1	TASIKMALAYA - BOGOR	TSM18786		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tida berlaku
2	BUDIMAN	B 7589 AO			1		BEKASI - TASIKMALAYA	BO198682		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
3	GUNUNG HARTA	N 7628 UA	1				JAKARTA - MALANG	ML37688		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
4	HARYANTO	B 7182 VGA				1	TANGGERANG - PATI	TNG97010		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KP tidak berlaku
5	MGI	D 7458 AO			1		DEPOK - BANDUNG	BD183263		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
6	AGRA MAS	B 7355 KGA			1		MERAK - BOJONEGORO	BKS170601		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lampu mundur mati
7	HARAPAN JAYA	AG 7784 US			1		JAKARTA - BLITAR	TA6644B		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Kaca depan retak
8	NPM	BA 7030 NU	1				MEDAN - PADANG	AD74B22000057		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus
9	MEDALI MAS	N 7032 UB	1				BOGOR - MALANG	BF73B23001724		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lulus

Jatijajar | Poris Plawad | Barangsiang | Pulo Gebang | Pondok Cabe | Kampung Rambutan | Kalideres | Bekasi | Tanjung Priok | Lampiran

Ready | Accessibility: Investigate

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I

Direktorat Lalu Lintas

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Lalu Lintas selama kurun waktu triwulanan.

Jakarta, April 2023

Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc.
NIP 196510151988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. PERJANJIAN KINERJA 3

BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 5

2.1. CAPAIAN KINERJA 5

2.2. REALISASI ANGGARAN 10

2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA 12

BAB IIIV PENUTUP 13

3.1. KESIMPULAN 13

3.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT 14

L A M P I R A N 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2023 3

Tabel 1.2 Pagu Anggaran Awal Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas..... 4

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas BPTJ Triwulan I Tahun 2023 5

Tabel 2.2 Tabel Realisasi dan Capaian IKK6 Kecepatan Rata- rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek 6

Tabel 2.3 Tabel Realisasi dan Capaian IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu 7

Tabel 2.4 Tabel Rekapitulasi Hasil Survei dan Permohonan Data Ketepatan Waktu Perjalanan KA Perkotaan Jabodetabek Tahun 2022 8

Tabel 2.5 Tabel Realisasi dan Capaian IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek 9

Tabel 2.6 Rekapitulasi Data Pengadaan Perlengkapan Jalan s.d. Tahun 2022 9

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Direktorat Lalu Lintas BPTJ merupakan unit kerja penunjang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Transportasi Darat, Lalu Lintas Transportasi Perkeretaapian, serta Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pelaksanaan tugas Direktorat Lalu Lintas BPTJ dalam rangka memenuhi fungsinya untuk (1) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencaan dan program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Transportasi Darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; (2) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitas teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas Transportasi Perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; (3) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pembentukan Direktorat Lalu Lintas merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2018. Pembentukan Organisasi ini selanjutnya dIIIkuti dengan penetapan Peta Jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dimana Direktorat Lalu Lintas memiliki tiga unit kerja Eselon IIII dan 1 (satu) unit kerja eselon I yang terdiri dari Subdirektorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Subdirektorat Lalu Lintas Perkeretaapian, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Transportasi dan Subbagian Tata Usaha.

Dengan ditetapkannya PM 110 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Lalu Lintas BPTJ dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

dan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala BPTJ, sehingga kewenangan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mutlak ada di BPTJ. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam *timeline*, pengimplementasian RITJ memerlukan waktu 12 (dua belas) tahun, yang telah dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2029. Pembangunan dalam waktu 12 tahun ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus ndicato dan ndica agar permasalahan transportasi dapat terselesaikan secara menyeluruh. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga badan usaha selaku pengembang maupun operator. Selain itu, dalam perencanaan transportasi dibutuhkan juga sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Seiring dengan perkembangan waktu, perencanaan transportasi dan tata ruang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Lalu Lintas BPTJ Triwulan I Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPTJ sangat didukung oleh kinerja unit kerja Eselon IIII dan III di lingkungan Direktorat Lalu Lintas BPTJ.

Pada tahun 2020, BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Renstra BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi BPTJ. BPTJ pada tahun 2023 memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi outcome dan merupakan core business yang menjadi dasar analisis capaian kinerja BPTJ Triwulan I Tahun 2023. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi outcome dan merupakan core business dari BPTJ. Laporan berikut berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target IKP yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Lalu Lintas BPTJ selama kurun waktu Triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Lalu Lintas BPTJ pada periode berikutnya.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Lalu Lintas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk Tahun 2023 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dengan Pejabat Eselon IIII, Pejabat Eselon IIII dengan Subkoordinator.

Sasaran Kegiatan Direktorat Lalu Lintas BPTJ merupakan kondisi yang dIIInginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPTJ, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dari Sasaran Kegiatan dijabarkan menjadi tiga Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 1.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	**SK2** Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKK6** Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	Km/jam	27
2.	**SK3** Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK9** Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	%	90
3.	**SK4** Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	**IKK10** Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	%	67

Dalam perjanjian kinerja juga tertuang pagu anggaran Direktorat Lalu Lintas 2023. Pagu anggaran awal untuk tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp63.073.352.000 (enam puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Rincian pagu anggaran berdasarkan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pagu Anggaran Awal Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL
1.	**IKK6** Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	23.031.689.000
2.	**IKK9** Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	3.988.377.000
3.	**IKK10** Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	36.053.286.000
	Total	63.073.352.000

Pagu anggaran yang ditetapkan dimanfaatkan untuk operasional kegiatan sesuai dengan program kegiatan pada dokumen perencanaan anggaran serta rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB II

DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengetahui realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah dIIIdentifikasi agar sasaran kegiatan yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas BPTJ Tahun 2023 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Lalu Lintas BPTJ, berikut merupakan target Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja lingkungan Direktorat Lalu Lintas, realisasi, dan capaian pada Triwulan I Tahun 2023:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas BPTJ Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
SK2 Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	**IKK6** Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	Km/jam	27	26,25	40,65	154,87
SK3 Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	**IKK9** Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	%	90	88,5	91	102,84
SK4 Terpenuhinya Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Wilayah Jabodetabek	**IKK10** Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	%	67	65,4	74	113,14

2.1.1. IKK6 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek

Kecepatan Rata – rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 154,87% dari target kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada Triwulan I sebesar 26,25km/jam dengan realisasi sebesar 40,65km/jam.

Tabel 2.2 Tabel Realisasi dan Capaian IKK6 Kecepatan Rata- rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi 2022	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)
IKK6 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	Km/jam	27	26,25	43,10	40,65	154,87

Survei kecepatan kendaraan penumpang dilakukan pada jalan nasional di Jabodetabek. Berdasarkan penghitungan atas data hasil survei, diperoleh kecepatan rata - rata tiap bulan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Grafik Kecepatan Rata – rata Kendaraan Penumpang di Jabodetabek

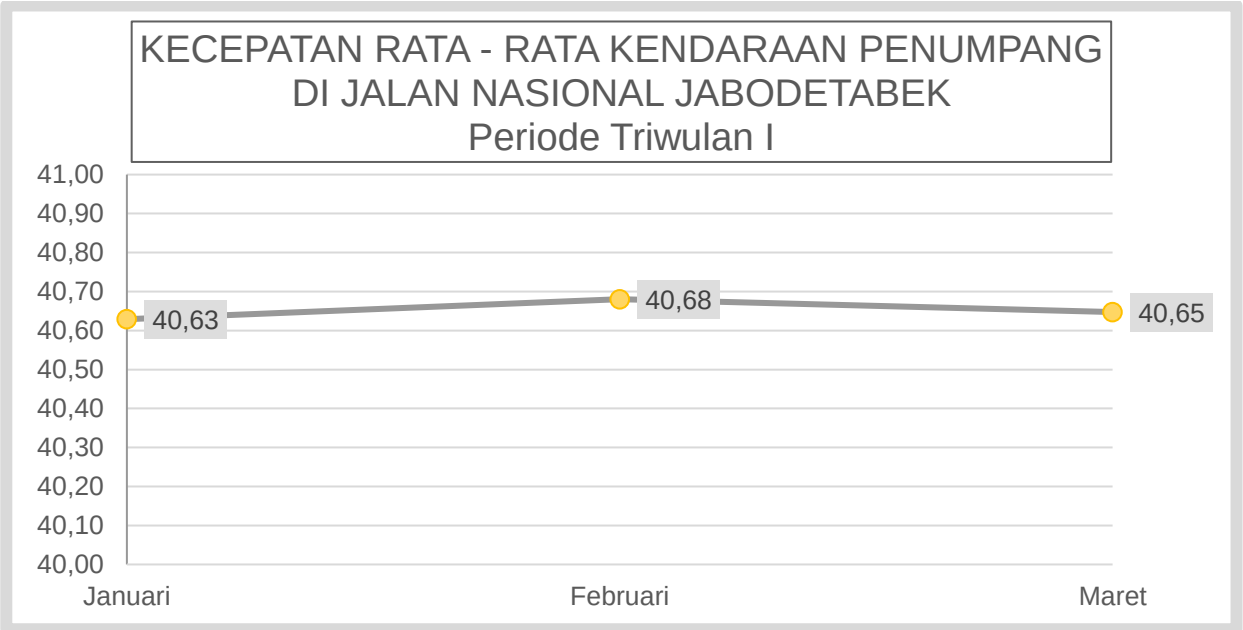

Kecepatan rata-rata kendaraan penumpang pada jalan nasional Jabodetabek pada Triwulan I Tahun 2023 dengan nilai tertinggi sebesar 40,68km/jam pada bulan Februari dan kecepatan rata-rata terendah sebesar 40,63km/jam pada bulan Januari. Target rata-rata kecepatan kendaraan penumpang di jalan nasional Tahun 2023 sebesar

26,25km/jam, oleh karena itu kecepatan rata-rata setiap bulan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 2.2 tersebut terlihat terjadi penurunan rata – rata kecepatan kendaraan penumpang dari akhir tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2023 dengan penurunan . Penurunan merupakan dampak dari pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022 lalu. Dengan kembali normalnya kehidupan masyarakat, terdapat keleluasaan masyarakat untuk bepergian sehingga meningkatkan volume kendaraan secara signifikan dibandingkan pada saat PPKM di berlakukan.

Beberapa upaya yang dilaksanakan pada triwulan I untuk dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu melakukan rekayasa lalu lintas pada beberapa lokasi yaitu survei pemantauan lalu lintas pada ruas jalan dan simpang di jalan nasional Jabodetabek, koordinasi penanganan kemacetan, serta monitoring evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas di beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan kemacetan seperti kawasan pusat industri/pabrik dan kawasan pusat perbelanjaan.

2.1.2. IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu

Kereta api perkotaan merupakan salah satu angkutan umum massal yang digemari oleh masyarakat terutama di wilayah Jabodetabek. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu waktu tempuh yang relatif cepat untuk perjalan jarak jauh serta waktu keberangkatan dengan jadwal yang jelas. Pelaksanaan pengukuran persentase perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu bertujuan untuk menjaga kinerja transportasi kereta api perkotaan. Perbandingan nilai target dan realisasi capaian dari realisasi serta penghitungan capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Tabel Realisasi dan Capaian IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi 2022	Realisasi TW I	Capaian (%)
IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	%	90	88,5	90,83	91	102,84

Persentase Perjalananan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu pada Tahun 2023 mencapai 102,84% dari target persentase ketepatan waktu sebesar 88,5% dengan

realisasi sebesar 91%. Nilai realisasi persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan didapatkan dengan menghitung rata - rata persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan Triwulan I yang didapat dari hasil survei dan permohonan data kepada stakeholder terkait. Ketepatan waktu perjalanan kereta apu perkotaan Jabodetabek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Tabel Rekapitulasi Hasil Survei dan Permohonan Data Ketepatan Waktu Perjalanan KA Perkotaan Jabodetabek Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perjalanan KRL / Bulan	KRL Tepat Waktu	KRL Terlambat	% Ketepatan Waktu Keberangkatan	Rata -rata Ketepatan Waktu s.d. Bulan ke (n)
1	Januari	33.325	30.713	2.612	92,2%	92,2%
2	Februari	29.988	27.028	2.960	90,1%	91,1%
3	Maret	33.728	30.611	3.117	90,8%	91,0%
	Jumlah	97.041	88.352	8.689		

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, ketepatan waktu di tiap bulan sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi kereta api perkotaan yang tepat waktu dilakukan beberapa upaya diantaranya : (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; (2) Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek; dan (3) Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek.

Rencana jangka panjang untuk pengembangan transportasi kereta api perkotaan, pada triwulan berikutnya akan melakukan studi kelayakan pembangunan LRT Pondok Cina – Citayam dan studi kelayakan perlintasan tidak sebidang Citayam – Nambo.

2.1.3. IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek

Perlengkapan jalan adalah semua yang mencakup bagian jalan dan terdapat beberapa kriteria sebagai pertimbangan untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan termasuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman jalan (Mahardika: 2016). Untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan khususnya di jalan nasional wilayah Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupaya memberikan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai yang dituangkan pada indikator kinerja kegiatan ini.

IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek pada Tahun 2023 memiliki target untuk Triwulan I sebesar 65,4%. Pada Triwulan I pengadaan perlengkapan jalan masih dalam tahap lelang sehingga belum ada penambahan perlengkapan jalan terpasang dari awal tahun 2023.

Tabel 2.5 Tabel Realisasi dan Capaian IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	%	67	65,4	82,93	0

Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi pengadaan perlengkapan jalan hingga akhir tahun 2022 berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, *Warning Light*, dan Alat Penerangan Jalan. Untuk capaian pengadaan perlengkapan jalan tertinggi adalah Alat Penerangan Jalan sebesar 94,04% dan yang paling rendah adalah Perlengkapan Jalan Rambu *Overhead* sebesar 68,06%. Pengadaan perlengkapan jalan pada Tahun 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Data Pengadaan Perlengkapan Jalan s.d. Tahun 2022

Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Total Kebutuhan	Realisasi s.d. 2021	Pengadaan Tahun 2022		Total	Persentase
				Rencana	Realisasi		
Rambu Overhead	Unit	2.195	1.395	99	99	1.494	68,06%
Warning Light	Unit	367	324	17	17	341	92,92%
Alat Penerangan Jalan	Unit	2.837	2.451	217	217	2.668	94,04%
Marka Jalan	Meter’	1.619.585	949.560	292.437	292.437	1.241.997	76,69%
Rata - Rata							**82,93%**

2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Direktorat Lalu Lintas BPTJ pada Tahun 2023 berdasarkan pagu dalam POK sebesar Rp63.073.352.000.- yang secara keseluruhan berasal dari rupiah murni. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 anggaran Direktorat Lalu Lintas yang telah terealisasi sebesar Rp13.287.708.309.- atau 21,07% terhadap pagu anggaran. Pagu anggaran. realisasi. dan persentase daya serap anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Daya Serap %
a	b	d	e = d/c
IKK6 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek	Rp23.031.689.000	Rp2.087.334.452	9,06
IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu	Rp3.988.377.000	Rp269.285.400	6,75
IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek	Rp36.053.286.000	Rp10.931.088.457	30,32
TOTAL	Rp63.073.352.000	Rp13.287.708.309	21,07

Realisasi anggaran pada Tahun 2023 yang mendukung IKK6. IKK9. dan IKK10 yang direalisasi dengan penyelenggaraan kegiatan – kegiatan di Direktorat Lalu Lintas. yaitu sebagai berikut:

1. IKK6 meliputi kegiatan:

-	Peningkatan Layanan Kinerja Lalu Lintas Ruas dan Simpang di Jabodetabek
-	Simulasi Penanganan Permasalahan Lalu Lintas di Wilayah Jabodetabek
-	Pengadaan Perangkat Lunak Simulasi Transportasi (Blokir)
-	Penyimpanan Alat Survey dan Penunjang Lalu Lintas
-	Rencana Umum Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
-	Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek
-	Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek
-	Monitoring Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Jabodetabek
-	Pembangunan Aplikasi Pengolahan Data dan Informasi (blokir)
-	Pengembangan Aplikasi Smart PJU (Blokir)

-	Pengembangan Aplikasi Bus Tracking System (Blokir)
-	Pengoperasian ATCS di Wilayah Jabodetabek
-	Pemeliharaan Perangkat ATCS dan Alat counting
-	Pemeliharaan VMS dan Drone
-	Pemeliharaan E-Terminal di Jatijajar
-	Pemeliharaan E-Terminal di Poris Plawad
-	Pengadaan Alat Counting Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek
-	Supervisi Pengadaan Alat Counting Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek
-	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Lalu Lintas Jabodetabek
-	Monitoring Pemeliharaan ATCS di Wilayah Jabodetabek
-	Monitoring Pengoperasian Teknologi Transportasi Jabodetabek

2. IKK9 meliputi kegiatan:

-	FS Perlintasan Tidak Sebidang Citayam - Nambo
-	Studi Kelayakan Pembangunan LRT Pondok Cina - Citayam
-	Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek
-	Monitoring dan Evaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
-	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penataan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di Wilayah Jabodetabek
-	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lalu Lintas Transportasi Jabodetabek

3. IKK10 meliputi kegiatan:

-	Pemeliharaan Alat Uji Perlengkapan Jalan
-	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional di Wilayah Jabodetabek
-	Pembayaran Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan Nasional
-	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Perkotaan Provinsi Jawa Barat
-	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Perkotaan Provinsi Banten
-	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Perkotaan Provinsi Jawa Barat (PEN)
-	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Perkotaan Provinsi Banten (PEN)
-	Sentralisasi Jalur Faber Optic ATCS BPTJ di Wilayah Jabodetabek
-	Supervisi Sentralisasi Jalur Faber Optic ATCS BPTJ di Wilayah Jabodetabek
-	Supervisi Pembangunan ATCS Terintegrasi Koridor Jabodetabek
-	Pembangunan ATCS Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek
-	DED Peningkatan ATCS dan Alat Counting di Jabodetabek

2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dengan memperhatikan laporan capaian kinerja tersebut di atas, capaian kinerja Direktorat Lalu Lintas pada Triwulan I Tahun 2023 rata – rata capaian telah melebihi target sampai dengan bulan Maret. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6 kecepatan rata – rata kendaraan penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek dinilai terdapat penurunan dari akhir tahun 2022 dibandingkan dengan periode Triwulan I yaitu dari 43,10km/jam menjadi 40,65Km/Jam. Hal ini merupakan salah satu dampak pencabutan PPKM pada Desember 2022. Walau demikian capaian kinerja pada Triwulan I tetap dapat tercapai dan dapat melebihi target Capaian yaitu 26,25km/jam dengan persentase capaian 154,87%.

IKK9 Persentase perjalanan kereta api perkotaan yang tepat waktu pada Triwulan I mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu dari 90,83% meningkat menjadi 91%. Walau tidak terlihat signifikan hal ini menjadi pertanda baik dalam hal peningkatan layanan konsumen dengan peningkatan kinerja ketepatan waktu kereta api perkotaan. Indikator kegiatan IKK10 dapat tercapai dengan nilai persentase ketepatan waktu kereta api perkotaan sebesar 91% dari targetnya yaitu 88% dengan nilai capaian 102,84%.

Capaian persentase IKK10, panjang ruas jalan nasional yang terpenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan pada Triwulan I masih belum terdapat penambahan sehingga nilai capaiannya masih sama dengan tahun lalu yaitu 82,93%

BAB III
PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kinerja Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Lalu Lintas telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai realisasi masing - masing indikator kinerja kegiatan yang telah melebihi target kinerja. Berikut nilai target, realisasi, dan capaian setiap indikator kinerja:

    a. IKK6 Kecepatan Rata – rata Kendaraan Penumpang di Jalan Nasional Jabodetabek memiliki target kinerja pada Triwulan I yaitu 26,25Km/Jam dengan realisasi 40,65Km/Jam. Capaian kinerja dihasilkan dari hasil membandingkan realisasi dengan target kinerja menghasilkan nilai capaian 154,87%. Capaian IKK6 pada Tahun 2023 telah mencapai dan melampaui target.

    b. IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu memiliki target kinerja Tahun 2023 sebesar 88,5% dengan realisasi 91%. Capaian kinerja IKK9 sebesar 102,84% dari membandingkan realisasi dengan target kinerja. Capaian yang telah melebihi 100% menandakan realisasi kinerja telah mencapai dan melampaui target.

    c. IKK10 Persentase Panjang Ruas Jalan Nasional yang Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek pada Triwulan I masih belum terdapat penambahan perlengkapan jalan sehingga persentase realisasinya masih sama dengan akhir tahun 2022 yaitu 82,93%.

2. Alokasi anggaran pada Tahun 2023 Direktorat Lalu Lintas sebesar Rp63.073.352.000 dan pada Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp13.287.708.309 atau sebesar 21,07%.

3.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari hasil analisis capaian kinerja, maka dapat disarankan beberapa saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian target yakni sebagai berikut :

1. Segera melakukan survei kinerja ruas dan simpang pada lokasi yang memiliki potensi tinggi kemacetan akibat pencabutan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Perlu adanya survei kinerja ketepatan kereta api perkotaan karena terdapat rencana perubahan grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) sekitar bulan Mei – Juni.
3. Percepatan pengadaan perlengkapan jalan yang merupakan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketepatan fungsi perlengkapan jalan yang akan dipasang pada masing – masing ruas jalan nasional.
4. Meningkatkan kualitas data dari *ATCS* dan Alat *Counting* dengan mengembangkan aplikasi pengolahan data dan informasi yang termutakhir.

L A M P I R A N

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2023 per Jenis Belanja

NO	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
1	Subdit LLTD	-	-	-	13.234.353.000	2.859.355.528	21,61%	9.710.600.000	5.619.720.000	57,87%	22.944.953.000	8.479.075.528	36,95%
2	Subdit LLKA	-	-	-	1.596.250.000	269.285.400	16,87%	2.392.127.000	-	-	3.988.377.000	269.285.400	6,75%
3	Subdit PSIT	-	-	-	5.607.022.000	1.424.104.555	25,40%	30.533.000.000	3.115.242.826	10,20%	36.140.022.000	4.539.347.381	12,56%
BPTJ		**-**	**-**	**-**	**20.437.625.000**	**4.552.745.483**	**22,28%**	**42.635.727.000**	**8.734.962.826**	**20,49%**	**63.073.352.000**	**13.287.708.309**	**21,07%**

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA

DIREKTORAT PRASARANA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK
POSISI 3 APRIL 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana BPTJ Triwulan I Tahun 2023**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Prasarana BPTJ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana BPTJ sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan prasarana transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Prasarana BPTJ Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan prasarana transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama triwulan I tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana BPTJ Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Prasarana BPTJ. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2023
DIREKTUR PRASARANA
BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK

Ir. ZAMRIDES, M.Si
NIP. 196612231994031001

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Noor Inggar Kurniasari	Arsiparis Ahli Muda Direktorat Prasarana		
2	Diperiksa	Santoso Sinaga	Kepala Subdirektorat Prasarana Tansportasi Darat		
3	Diperiksa	Rachmat Susilo	Plt. Kepala Subdirektorat Prasarana Tansportasi Perkeretaapian		
4	Diperiksa	Rachmat Susilo	Kepala Subdirektorat Integrasi Prasarana Tansportasi		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana BPTJ Triwulan I Tahun 2023**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Prasarana BPTJ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana BPTJ sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan prasarana transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Prasarana BPTJ Triwulan I Tahun 2023 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan prasarana transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama triwulan I tahun 2023 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana BPTJ Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Direktorat Prasarana BPTJ. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Direktorat Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, April 2023
DIREKTUR PRASARANA
BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JABODETABEK

Ir. ZAMRIDES, M.Si
NIP. 196612231994031001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan di Direktorat Prasarana secara berkala setiap satu kuartal. Metode pengumpulan data dengan cara inventarisasi dan dokumentasi.

Direktorat Prasarana telah melaksanakan monitoring terhadap kegiatan untuk triwulan pertama tahun 2023. Pagu anggaran Direktorat Prasarana sebesar RP. 48.319.404.000.- namun pada pertengahan bulan Januari terdapat penyesuaian anggaran (*Automatic Adjustment*) sehingga total pagu anggaran menjadi Rp. 45.363.474.000.-. Sampai dengan bulan April 2023, capaian realisasi anggaran sebesar Rp 678.322.877,- atau sebesar 2% dari target 25%. Kegiatan yang telah dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi prasarana transportasi di bidang darat, perkeretaapian, fasilitas integrasi pada simpul dan kawasan TOD, serta koordinasi perencanaan prasarana transportasi. Untuk kegiatan lainnya masih dalam proses lelang kegiatan kontrak.

Pada triwulan I ini, capaian indikator kinerja belum dapat terukur karena dalam proses pelaksanaan pengumpulan data dan analisis, sehingga akan dapat diukur pada periode capaian laporan triwulan II.

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Direktorat Prasarana BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana BPTJ Tahun 2023 dapat tercapai. Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana BPTJ, berikut adalah pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Prasarana BPTJ pada Triwulan I tahun 2023:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2023	Capaian TW I 2023	% Capaian
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaaan yang Terintegrasi	IKK1 Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	%	76	0*	0
	IKK2 Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	Rasio	0.0444	0*	0
	IKK3 Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	%	45	0*	0
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK4 Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	%	76	0*	0

Keterangan :

* Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belum dilaksanakan kegiatan/ perhitungan dari direktorat/lembaga terkait. Hasil perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan untuk mencapai target akan dilakukan pada triwulan II tahun 2023. Namun untuk progress kegiatan yang mendukung indikator kinerja dalam proses pelaksanaan.

Untuk capaian kinerja pada indikator kinerja yang masih belum dilakukan perhitungan maka menggunakan *baseline* pada tahun 2022 yaitu Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan dengan capaian sebesar **73.5%**, Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel dengan capaian sebesar **0.0415**, Persentase Simpul Transportasi Utama Yang Terintegrasi dengan capaian sebesar **37.7%** dan Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang dikelola oleh BPTJ dengan capaian sebesar **66%**.

A. IKK1 Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan

Persentase konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan diperoleh dari jumlah panjang trayek angkutan umum perkotaan dibandingkan dengan panjang jalan di jabodetabek. Dengan menggunakan baseline tahun 2022, Data panjang trayek angkutan umum perkotaan adalah sepanjang 12.759,3 Km sebagaimana disajikan pada lampiran. Sementara itu data panjang jalan di wilayah Jabodetabek dihimpun dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Berikut data panjang jalan di wilayah Jabodetabek :

Tabel 1. Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi di Wilayah Jabodetabek

KAB/KOTA	PANJANG JALAN (KM)		
	NASIONAL	PROVINSI	KAB/KOTA
Jakarta Timur	22,0	1.496,0	-
Jakarta Barat	12,0	1.170,0	-
Jakarta Selatan	14,0	1.986,0	-
Jakarta Utara	46,1	88,5	979,8
Jakarta Pusat	10,5	90,9	564,8
Kota Bogor	29,0	10,5	758,9
Kab. Bogor	118,0	107,3	1.748,9
Kota Depok	-	-	547,64
Kota Tangerang	18,4	31,8	306,5
Kota Tangerang Selatan	9,8	51,6	384,7
Kab. Tangerang	27,7	108,3	992,6
Kota Bekasi	13,6	22,0	4.573,5
Kab. Bekasi	29,0	31,5	953,3

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, hasil capaian kinerja pada IKK1 Konektivitas angkutan umum berbasis jalan menunjukkan pada rumus di bawah ini :

$$IKK1 = \frac{Panjang\ Trayek\ AU\ Perkotaan}{Panjang\ Jalan\ di\ Jabodetabek} \times 100\%$$
$$= \frac{12.759{,}3\ Km}{17.355{,}1\ Km} \times 100\%$$
$$= 73{,}5\%$$

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Pembangunan Jalur Sepeda Pada Ruas Jalan Kota Bekasi beserta Supervisinya lelang selesai pada bulan Maret dan telah dilaksanakan *Pre Construction* Meeting pada tanggal 29 Maret 2023. Pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada akhir Maret hingga April 2023. Berdasarkan hasil pengawasan, belum ditemukan permasalahan dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan pekerjaan secara berkala (mingguan).
2. Pembangunan Jalur Sepeda Pada Ruas Jalan Kabupaten Bogor beserta Supervisinya Proses lelang telah selesai dan dilanjutkan pelaksanaan Pre Contruction Meeting pada tanggal 27 Maret 2023 dan Survey *MCO* pada tanggal 29 Maret 2023, dalam proses pengawasan pekerjaan belum ditemukan permasalahan teknis pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada akhir Maret hingga April 2023. Setelah pekerjaan selesai direncanakan akan melakukan proses pengurusan hibah jalur sepeda.
3. Rencana Induk Terminal Tipe A Pondok Cabe
   Masih dalam proses lelang kegiatan kontrak.

B. IKK2 Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel

Perhitungan rasio konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel didapatkan dari jumlah panjang jalan rel kereta api perkotaan dibandingkan luas wilayah di jabodetabek. Sebagai suatu wilayah megapolitan di Indonesia mempunyai luas wilayah sebesar 6.437,89km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 29.116.662 jiwa. Detail luas wilayah dan jumlah penduduk di wilayah jabodetabek adalah sebagai berikut :

Tabel . Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten di Jabodetabek

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk
1	Kota Jakarta Barat	124,44	2.485.224
2	Kota Jakarta Pusat	52,38	1.145.569
3	Kota Jakarta Selatan	154,32	2.294.779
4	Kota Jakarta Timur	182,70	3.111.563
5	Kota Jakarta Utara	139,99	1.780.721
6	Kabupaten Kepulauan Seribu	10,18	28.289
7	Kota Bogor	118,50	1.029.084
8	Kabupaten Bogor	2.710,62	4.585.812
9	Kota Depok	200,29	1.844.932
10	Kota Tangerang	153,93	1.742.604
11	Kota Tangerang Selatan	147,19	1.262.284
12	Kabupaten Tangerang	1.011,86	2.728.654
13	Kota Bekasi	200,61	2.436.577
14	Kabupaten Bekasi	1.224,88	2.640.570
	Total	**6.437,89**	**29.116.662**

Sumber : BPS, 2021

Banyaknya penduduk yang ada di wilayah aglomerasi Jabodetabek, mobilitas transportasi perkotaan menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan angkutan umum massal perkotaan khususnya berbasis rel untuk mendukung

keterhubungan transportasi berkelanjutan dengan tujuan untuk mengurai kemacetan, percepatan waktu tempuh kendaraan dan alih moda dari transportasi pribadi menuju ke transportasi umum. Moda transportasi angkutan umum massal perkotaan berbasis rel di jabodetabek memiliki beberapa jenis yaitu diantaranya *Mass Rapid Transit* (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan Light Rail Transit (LRT).

Tabel 5. Tabel Basic Data Panjang Jalur Kereta Rel Listrik, Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek

No	Jalur Rute	Panjang Jalur (kilometer)
KRL		
1	Bogor – Manggarai	44.92
2	Duri – Tangerang	19.297
3	Manggarai – Jakarta Kota	9.596
4	Manggarai – Jatinegara	2.653
5	Jatinegara – Cikarang	36.543
6	Jakarta Kota – Kampung Bandan	1.364
7	Kampung Bandan – Tanjung Priok	6.01
8	Tenjo – Tanah Abang	48.151
9	Tenjo – Rangkas Bitung	24.618
LRT		
1	Cawang – Cibubur	14.89
2	Cawang – Dukuh Atas	11.05
3	Cawang – Bekasi Timur	18.49
4	Pegangsaan Dua - Velodrome	5.8
MRT		
1	Lebak Bulus – Bundaran HI	15.7
2	Bundaran HI - Kota	5.8
Total		**264.882**

Sumber : Direktorat Prasarana, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas dan rumus perhitungan konektivitas angkutan umum berbasis rel, didapatkan hasil capaian kinerja sebagai berikut :

$$IKK2 = \frac{Panjang\ jalan\ Rel\ KA\ Perkotaan}{Luas\ Wilayah\ Jabodetabek}$$
$$= \frac{264.882\ Km}{6.437{,}89\ Km^2}$$
$$= 0{,}0415$$

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Penyusunan Andalalin Pembangunan Reaktivasi Gunung Putri
   Tahapan pekerjaan mencapai proses lelang pelaksanaan kontrak dilakukan selama 6 (enam) bulan dimulai pada minggu pertama bulan April 2023 dan berakhir di awal bulan September 2023.
2. Penyusunan Andalalin Pembangunan Underpass Bojong Gede
   Tahapan pekerjaan mencapai proses lelang pelaksanaan kontrak dilakukan selama 6 (enam) bulan dimulai pada minggu pertama bulan April 2023 dan berakhir di awal bulan September 2023.

3. Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Perkeretaapian
   Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pemantauan terkait prasarana transportasi perkeretaapian yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan, diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan survei Bersama terkait konfirmasi batas lahan untuk kelanjutan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg dengan tujuan untuk menentukan asset batas lahan kepemilikan antara DJKA dan Pemerintah setempat. Rencana selanjutnya akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan BTP Kelas I Wil Jakarta & Banten DJKA dan Direktorat Keselamatan DJKA serta Daop 1.
   b. Rapat pembahasan perencanaan akseeibilitas dan fasilitas pedestrian di Stasiun Pondok Rajeg dengan tujuan menentukan aksesibilitas yang ada di desain gambar Stasiun Pondok rajeg, penyesuaian hasil super infos dari desain dan peta bidang BTP Jakarta pada batas bidang stasiun pondok rajeg. Untuk aksesibilitas penumpang agar diperhatikan, serta perhatikan juga gapeka agar tidak terjadi penumpukan di stasiun.
   c. Karena pembangunan stasiun yang ditargetkan setelah lebaran selesai, maka akan dilakukan penataan aksesibilitas yang ada di stasiun. Survei bersama perlintasan liar KM 41+100 Lintas Citayam - Nambo (Reaktivasi stasiun pondok rajeg) dimana terdapat pembangunan akses jalan perlintasan yang dibangun oleh warga pada lokasi tersebut sehingga perlu membongkar dan menghentikan aktivitas warga di perlintasan tersebut. tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengukur akses jalan yang sudah dibangun oleh warga dan kebutuhan peron sepanjang kurang lebih 10 meter agar perlintasan liar dapat ditutup, pemberitahuan disampaikan melalui pengiriman surat atau rapat ke lurah atau ke camat setempat.
4. Pendampingan Rencana Proyek KPBU Berbasis Rel di Wilayah Jabodetabek
   Kerja sama antara kementerian perhubungan dengan pemerintah daerah dapat terjalin melalui kegiatan Pendampingan Rencana Proyek KBU diawali dengan melaksanakan survey potensi kerjasama. Pelaksanaan Survei Potensi Kerjasama Pembangunan Stasiun Sukaresmi dengan tujuan menentukan batas lahan yang akan dijadikan lahan pembangunan stasiun. rencana selanjutnya akan dilakukan survey bersama terkait kebutuhan lahan untuk rencana sepur simpang di stasiun sukaresmi dan akan dilakukan koordinasi terkait persetujuan gambar teknis ke DJKA terkait stasiun gunung putri.Survei Potensi Kerjasama dalam Rencana Reaktivasi Stasiun dan Fasilitas Integrasi Pondok Betung dengan tujuan melihat batas lahan, jumlah penumpang, dan fasilitas integrasi.

C. IKK3 Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi

Untuk menghitung persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi membutuhkan data jumlah simpul transportasi yang memiliki fasilitas integrasi menuju/dari simpul pengumpan dibagi dengan jumlah total simpul transportasi di Jabodetabek. Berdasarkan hasil monitoring periode tahun sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan survey terkait ketersediaan fasilitas utama dan pendukung pada simpul transportasi, dengan demikian didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Simpul Transportasi Terintegrasi di wilayah Jabodetabek

Lokasi Simpul Transportasi	Jumlah Simpul Terintegrasi	Jumlah Total Simpul Transportasi
DKI Jakarta	41	98
Bekasi Raya	4	12
Kota Depok	3	6
Bogor Raya	2	14
Tangerang Raya	5	16
Total	**55**	**146**

Sumber : Direktorat Prasarana, 2022

Dari data tersebut didapatkan hasil pehitungan capaian kinerja sebesar 37.7% dengan uraian cara perhitungan di bawah ini :

$$IKK3 = \left(\frac{\sum Simpul\ utama\ dengan\ akses\ integrasi\ ke\ dan\ dari\ simpul\ pengumpan}{\sum Total\ Simpul\ utama\ di\ jabodetabek}\right) \times 100\%$$

$$= \left(\frac{55}{146}\right) \times 100\%$$

$$= 37.7\%$$

Namun pada proses pengumpulan dan analisis data, didapatkan perubahan jumlah total simpul transportasi pada tahun 2023 yang semula sebesar 146 menjadi 151 simpul. peningkatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan transportasi antar moda di wilayah jabodetabek. Sebagai detail jumlah simpul transportasi utama di jabodetabek tersedia pada lampiran. Perhitungan capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun berjalan baru akan disampaikan pada periode triwulan II.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Peningkatan Bangunan Operasional Fasilitas Integrasi Pendukung pada (*Skybridge*) Bojonggede beserta Supervisinya
   Tahapan Pekerjaan masih dalam proses lelang.
2. Peningkatan Bangunan Operasional Stasiun Pondok Rajeg dan Supervisinya
   a) Pelaksanaan dijadwalkan akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2023;
   b) Pelaksanaan kontrak dilakukan selama 6 bulan dan berakhir bulan November 2023.
3. Kajian Lalu lintas Pembangunan Fasilitas Integrasi Perpindahan Moda di Kawasan Stasiun Bogor (Kota Bogor)
   Kegiatan terkena *Automatic Adjustment.*
4. Penyusunan DED Fasilitas perpindahan Moda dan Fasilitas Penunjang Integrasi di Kawasan Stasiun Serpong
   Dalam proses lelang kegiatan.
5. Penyusunan Masterplan kawasan berorientasi angkutan umum massal di wilayah jabodetabek
   Dalam proses lelang kegiatan.

6. Koordinasi Perencanaan dan Harmonisasi Prasarana Transportasi Jabodetabek
   kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait perencanaan transportasi di bidang prasarana dengan mengumpulkan data dan hasil pengukuran serta memantau perubahan yang terjadi pada proses dan output kegiatan prasarana transportasi yang selanjutkan akan dilakukan penyelarasan/penyesuaian dari hasil pembahasan evaluasi. Pada awal tahun, dilaksanakan pembahasan penyusunan rencana pemantauan kegiatan prasarana selama satu tahun. Pada bulan Maret dilakukan evaluasi atas hasil pemantauan kegiatan untuk dilakukan percepatan kegiatan kontraktual dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perhitungan capaian kinerja dilakukan analisis.

D. IKK4 Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ

Standar Pelayanan Minimum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolak ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara. Salah satunya penerapan pemenuhan SPM Terminal yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana BPTJ. Persentase pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang dikelolah oleh BPTJ diperoleh dari jumlah indikator SPM Terminal Tipe A yang terpenuhi dibandingkan dengan jumlah total indikator SPM Terminal Tipe A.

Tabel 9. Hasil Survey Monitoring SPM Terminal Tipe A Jabodetabek

Lokasi Survey SPM di Terminal Tipe A	Hasil Survey Monitoring SPM Terminal Tipe A Jabodetabek		Hasil Perhitungan
	Skor Indikator SPM Terminal Tipe A yang dapat Terpenuhi	Skor Maksimum Terpenuhi Indikator SPM Terminal Tipe A	
Jatijajar	27	39	69%
Pondok Cabe	27	39	69%
Baranangsiang	12	39	31%
Poris Plawad	21	39	54%

Sumber : Direktorat Prasarana, 2022

Dari data di atas dapat dilakukan perhitungan capaian kinerja pada IKK 4 Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A sebagai berikut :

$$IKK4 = \left(\frac{\sum Indikator\ SPM\ terminal\ tipe\ a\ yang\ terpenuhi}{\sum Total\ Indikator\ SPM\ terminal\ tipe\ a}\right) \times 100\%$$
$$= \left(\frac{87}{156}\right) \times 100\%$$
$$= 56\%$$

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik Tenaga Surya di Terminal Tipe A Jatijajar dan Supervisinya
   Tahapan pengadaan dalam proses lelang.
2. Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Charging Station di Terminal Tipe A Pondok Cabe dan Supervisinya
   Kegiatan dialihkan menjadi “Pembangunan Jalur Sepeda di Ruan Jalan Kota Depok”.
3. Pemeliharaan Fasilitas Halte *Buy The Service* di Kota Bogor
   Tahapan pengerjaan dalam proses lelang.
4. Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Darat di Wilayah Jabodetabek
   Perancangan survei SPM dan SKM Prasarana dan Pelayanan di Terminal Tipe A Jabodetabek dilanjutkan dengan persiapan survei pada 27 Februari 2023 dengan mempertimbangkan metode pengolahan data survei yang perlu diperkuat dan diperbarui dan tambahan lokasi survei di Terminal Tanjung Priok sebagai terminal Tipe A tambahan di Jabodetabek. pelaksananaan survei SPM dilaksanakan pada sepanjang bulan Maret 2023 di 9 terminal tipe A di Jabodetabek (4 Jakarta, 1 Bekasi, 4 milik BPTJ). rencana tindaklanjut Proses pengumpulan data dan penyusunan pelaporan hasil SPM dilanjutkan rencana persiapan survei SKM dan persiapan survei halte BTS Kota Bogor.

REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran Direktorat Prasarana sebesar Rp. 48.319.404.000.- namun pada pertengahan bulan Januari terjadi *Automatic Adjustment* (AA) untuk beberapa kegiatan, sehingga total pagu anggaran setelah terjadi AA sebesar Rp. 45.363.474.000.- dengan komposisi pagu kegiatan kontraktual sebesar Rp. 41.145.874.000.- dan pagu kegiatan swakelola sebesar Rp. 4.217.600.000.-. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disampaikan sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Kontraktual			Swakelola		
		Pagu	Realisasi	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Subdirektorat Prasarana Transportasi Darat	17.612.133.000	5.453.761.960	12.158.371.040	1.570.000.000	708.810.834	861.189.166
2	Subdirektorat Prasarana Transportasi Perkeretaapian	16.203.741.000	2.835.164.100	13.368.576.900	1.307.600.000	341.032.762	966.567.238
3	Subdirektorat Integrasi Prasarana Transportasi	7.128.178.900	1.301.777.300	6.028.222.700	367.731.869	367.731.869	972.268.131

Sampai dengan bulan April 2023, Direktorat Prasarana sudah mencapai realisasi sebesar Rp. 678.322.877,- dengan persentase capaian sebesar 2%. Penyerapan anggaran berbasis kinerja seharusnya berpegang pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan input atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi TW I	% Capaian
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkotaaan yang Terintegrasi	IKK1 Persentase Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan	Rp 9.899.161.000	Rp -	0%
	IKK2 Rasio Konektivitas Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Rel	Rp 2.507.600.000	Rp 250.391.602	10%
	IKK3 Persentase Simpul Transportasi Utama yang Terintegrasi	Rp 24.343.741.000	Rp 283.134.617	1%
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Jabodetabek	IKK4 Persentase Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ	Rp 8.376.435.000	Rp 144.796.658	2%

PENUTUP

Berdasarkan hasil monitoring kinerja triwulan I Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Prasarana BPTJ, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan jalur sepeda yang telah berhasil kontrak, dilanjutkan dengan pelaksanaan *preconstruction meeting* dan *MC0* survey;
2. Kegiatan monitoring prasarana transportasi dalam bidang kerja darat, perkeretaapian, dan integrasi telah dilaksanakan berkala setiap bulan;
3. Perhitungan capaian IKK4 yaitu Pemenuhan SPM Terminal Tipe A yang Dikelola oleh BPTJ, telah dilaksanakan survey SPM di 9 Terminal Tipe A di Jabodetabek sepanjang bulan maret 2023, sehingga analisis dan hasil capaian dapat ditinjau pada periode berikutnya.

Adapun dari kesimpulan di atas, sebagai saran dan tindak lanjut untuk pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya antara lain :

1. Kegiatan kontrak yang masih mendapatkan kendala dalam proses lelang perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kontrak dengan memperhatikan data dukung yang dibutuhkan dan pelaksanaan penjadwalan ulang pelaksanaan lelang;
2. Kegiatan monitoring prasarana transportasi yang dilakukan secara rutin juga perlu memperhatikan indikator kinerja kegiatan sehingga dapat terhitung hasil capaian kinerja;
3. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk proses hibah dan perizinan kegiatan berlangsung.